

KATA PENGANTAR

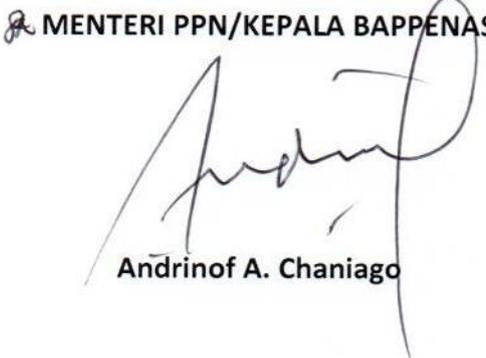
LAPORAN KINERJA Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Tahun 2014 sebagai laporan kinerja tahun terakhir (kelima) pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2014, yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2014. Oleh karena laporan kinerja ini merupakan laporan kinerja tahun terakhir pelaksanaan Renstra Tahun 2010-2014, maka dalam ulasannya juga disampaikan perkembangan dan hasil kinerja kurun waktu 2010-2014.

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas, selama tahun 2014 telah menghasilkan Rancangan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 yang berkualitas serta telah menyelesaikan berbagai penugasan lainnya dalam rangka koordinasi dan kerjasama pembangunan, baik secara nasional maupun internasional. Rancangan Dokumen RKP 2015 serta penugasan lainnya tersebut dihasilkan melalui suatu proses koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis/pengkajian kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selanjutnya dokumen RKP 2015 menjadi arah kebijakan nasional tahun 2015 dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan di Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019. Seluruh kebijakan, program dan kegiatan tahun 2014 telah berhasil dilaksanakan dengan baik serta tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerjanya telah berhasil dicapai.

Kementerian PPN/Bappenas terus berupaya meningkatkan perannya sebagai pengambil kebijakan/keputusan, *think tank*, koordinator, dan administrator, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyelesaikan permasalahan bangsa melalui kegiatan perencanaan pembangunan nasional dan kegiatan-kegiatan strategis lainnya yang bersifat mendukung kegiatan perencanaan pembangunan.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan penyusunan kebijakan pembangunan nasional.

Jakarta, 26 Februari 2015

 MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS

Andrinof A. Chaniago

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA.....	5
A. RENCANA STRATEGIS.....	5
B. PENETAPAN KINERJA.....	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
A. ANALISA CAPAIAN KINERJA	11
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	48
C. BEBERAPA PENGHARGAAN YANG DITERIMA OLEH KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS	53
BAB IV PENUTUP	55
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL 1	FUNGSI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	2
TABEL 2	PENJABARAN PERAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS.....	3
TABEL 3	ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2014	4
TABEL 4	SANDINGAN PENYEMPURNAAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2014.....	6
TABEL 5	PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014.....	8
TABEL 6	KONTRIBUSI TARGET DAN REALISASI DARI UNIT KERJA ESELON I	9
TABEL 7	HASIL CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014.....	12
TABEL 8	PEMETAAN KESESUAIAN MUATAN RT-RPJMN 2015-2019 DENGAN RPJPN 2005-2025	15
TABEL 9	PEMETAAN KESESUAIAN MUATAN RKP 2015 DENGAN RT-RPJMN 2015-2019	19
TABEL 10	PEMETAAN KESESUAIAN MUATAN RENJA-K/L 2015 DENGAN RKP 2015.....	21
TABEL 11	REKAPITULASI HASIL PEMETAAN IKK RENCANA TINDAK ISU STRATEGIS RKP 2015 BERDASARKAN ISU STRATEGIS PER BIDANG.....	24
TABEL 12	PENILAIAN PARAMETER KETERKAITAN DALAM ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA 2014	27
TABEL 13	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENGGUNAKAN APLIKASI E-MUSRENBANG	28
TABEL 14	KEBUTUHAN SDM PERENCANA BERKUALITAS TINGKAT NASIONAL BERDASARKAN DIKLAT GELAR.....	29
TABEL 15	KEBUTUHAN SDM PERENCANA BERKUALITAS TINGKAT NASIONAL BERDASARKAN DIKLAT NON GELAR	29
TABEL 16	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DARI PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2014	32
TABEL 17	TINGKAT IMPLEMENTASI PROSES PENYUSUNAN RKP 2015	33
TABEL 18	HASIL SURVEI PENYUSUNAN RKP 2013-2015	34
TABEL 19	MUTU TAHAPAN KEGIATAN PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019	35
TABEL 20	DOKUMEN PERENCANAAN ATAU PELAPORAN LAINNYA YANG DIHASILKAN OLEH MASING-MASING KEDEPUTIAN	37
TABEL 21	HASIL PENILAIAN PMPRB KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2014	43
TABEL 22	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2014....	49

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1	STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.....	3
GAMBAR 2	JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN	4
GAMBAR 3	VISI DAN MISI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	5
GAMBAR 4	TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2014	7
GAMBAR 5	KERANGKA PIKIR RT-RPJMN 2015-2019	18
GAMBAR 6	TAHAPAN PENILAIAN ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2014	26
GAMBAR 7	PERBANDINGAN JUMLAH PERENCANA YANG LULUS DIKLAT GELAR DAN NON GELAR	30
GAMBAR 8	OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN	46
GAMBAR 9	REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2011, 2012, 2013, DAN 2014	52
GAMBAR 10	PENGHARGAAN YANG DITERIMA OLEH KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	53

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1: PERNYATAAN REVIU LAPORAN KINERJA 2014 OLEH INSPEKTUR UTAMA
- LAMPIRAN 2: RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2014
- LAMPIRAN 3: PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2014

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2014 merupakan laporan kinerja tahun kelima pelaksanaan Renstra 2010-2014 dan melaporkan pencapaian visi, misi, dan tujuan selama lima tahun terakhir (2010-2014). Laporan ini adalah perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Visi Kementerian PPN/Bappenas adalah “Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara”. Untuk mewujudkan visi tersebut, dilaksanakan misi yaitu: 1) Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas; 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang; dan 3) Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN/Bappenas.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator yang ingin dicapai dalam tahun 2014 yang merupakan penajaman dari sasaran dan indikator kinerja tahun-tahun sebelumnya (2010-2013).

Tujuan, Sasaran dan Indikator Tahun 2014 Kementerian PPN/Bappenas

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1. Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas	1.1. Tercapainya perencanaan yang terintegrasi, sinkron dan sinergis, antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, dengan penganggarannya	1.1.1. % kesesuaian muatan antara RT-RPJM 2015-2019 dengan RPJPN 2005-2025 1.1.2. % kesesuaian muatan antara RKP 2015 dengan RT-RPJM 2015-2019 1.1.3. % kesesuaian muatan antara Renja K/L 2015 dengan RKP 2015 1.1.4. % kesesuaian rancangan RKA K/L 2015 dengan RKP 2015 1.1.5. % kesesuaian RKPD Provinsi 2015 dengan RKP 2015 1.1.6. Rasio kecukupan SDM Perencana yang berkualitas di K/L/P
	1.2. Terlaksananya program-program pembangunan sesuai dengan rencana	1.2.1. % sasaran Prioritas Nasional yang telah sesuai dengan rencana
	1.3. Tingkat kepercayaan stakeholders terhadap produk perencanaan	1.3.1. Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RKP 2015 1.3.2. Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RPJMN 2015-2019
2. Terwujudnya koordinasi kebijakan pembangunan lainnya sesuai peran Kementerian PPN/Bappenas	2.1. Meningkatnya peran Kementerian PPN/Bappenas terkait koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya	2.1.1. % dokumen perencanaan atau pelaporan lainnya yang disetujui atau disepakati oleh pemberi tugas (Presiden, Wapres, Menko) 2.1.2. % K/L/P yang telah menindaklanjuti program-program penugasan khusus
3. Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas	3.1. Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas	3.1.1. Nilai RB K/L 3.1.2. Opini BPK 3.1.3. Skor Evaluasi AKIP

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, secara umum Kementerian PPN/Bappenas telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja. Selama tahun 2014, telah dihasilkan rancangan rencana pembangunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas, mewujudkan koordinasi kebijakan pembangunan lainnya sesuai perannya, dan mencapai peningkatan kapasitas kelembagaan.

Rancangan RPJMN 2015-2019 telah disusun sesuai dengan proses yang terdapat dalam UU 25 tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional. Disamping itu, produk perencanaan lain yang dihasilkan adalah Rancangan RKP 2015 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Tema dari RKP 2015 adalah “Melanjutkan Reformasi Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan”.

Dalam menyusun rancangan dokumen perencanaan nasional Jangka Menengah (RPJMN) dan Jangka Pendek (RKP) seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Mitra Pembangunan, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi dan Organisasi Masyarakat Sipil telah dilibatkan melalui berbagai forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Konsultasi Publik. Hal tersebut bertujuan untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas baik.

Kementerian PPN/Bappenas juga telah menyelesaikan berbagai penugasan lainnya, baik yang diberikan Pemerintah/Presiden dalam rangka peningkatan koordinasi dan kerjasama pembangunan melalui suatu rencana aksi nasional maupun kerjasama pembangunan internasional. Langkah-langkah proaktif juga telah dilakukan melalui berbagai upaya perencanaan rencana aksi dan koordinasi yang bersifat strategis untuk mempercepat pencapaian pembangunan nasional. Koordinasi dan rencana aksi tersebut juga melibatkan berbagai pihak mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan kerjasama dengan pihak swasta.

Sedangkan dalam kaitan peningkatan kapasitas kelembagaan, telah dicapai hasil yang memuaskan. Dalam bidang pengelolaan keuangan, opini yang didapat dari BPK mendapatkan predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) sebagai opini tertinggi. Dalam pengembangan kapasitas kelembagaan dari aspek organisasi, manajemen SDM dan tatalaksana, penguatan akuntabilitas kinerja, pengawasan serta pelayanan, baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mendukung tujuan reformasi birokrasi nasional, telah dilakukan pengukuran yang melibatkan pihak eksternal dengan hasil “baik”.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2014 dan tahun-tahun sebelumnya selama periode Renstra 2010-2014, secara umum Kementerian PPN/Bappenas telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi misi dan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja. Trend hasil kinerja menunjukkan peningkatan kualitas hasil dengan pencapaian yang terus meningkat sampai dengan tahun terakhir Renstra 2010-2014.

Walaupun hasil kinerja yang didapat semakin meningkat, masih terdapat beberapa *area of improvement* yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja di tingkat koordinasi. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan peran sebagai pengambil kebijakan/keputusan, *think tank*, koordinator, dan administrator, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyelesaikan permasalahan bangsa melalui kegiatan perencanaan pembangunan nasional dan kegiatan-kegiatan strategis lainnya yang bersifat mendukung kegiatan perencanaan pembangunan.

Beberapa upaya untuk mendorong optimalisasi peningkatan kinerja secara terus menerus adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran dalam mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan termasuk penentuan sasaran atau target yang lebih realistis, dengan mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan strategis nasional dan internasional.
2. Terus melakukan peningkatan kompetensi SDM agar dapat cepat tanggap dalam memprediksi atau mendeteksi dini (*early warning system*) terhadap perubahan lingkungan strategis nasional maupun internasional, sehingga dapat segera mengambil langkah-langkah antisipatif dalam memecahkan persoalan pembangunan nasional.
3. Melakukan perbaikan dan pengembangan kapasitas kelembagaan dalam mendukung Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan public sesuai dengan value "*Better Performance*" yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja secara berkala dan berjenjang terhadap unit kerja eselon II, unit kerja eselon I, sampai tingkat lembaga yang didukung oleh aplikasi *e-performance*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kementerian PPN/Bappenas bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, berkewajiban untuk menyiapkan konsep kebijakan pemerintah berupa perencanaan pembangunan nasional jangka panjang (20 tahunan), jangka menengah (5 tahunan), dan jangka pendek (1 tahunan). Selanjutnya, dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh kementerian/lembaga dalam menyusun rencana kerja masing-masing, dan sebagai dasar merumuskan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun Renstra periode 2010-2014 untuk menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang bertujuan untuk (1) Mewujudkan rencana pembangunan yang berkualitas; (2) Mewujudkan koordinasi kebijakan pembangunan lainnya sesuai dengan perannya; dan (3) Mencapai peningkatan kapasitas kelembagaan.

Sesuai dengan Renstra 2010-2014, rencana pembangunan tersebut dituangkan dalam produk perencanaan pembangunan RPJMN, dan RKP setiap tahun. Rancangan kebijakan disusun melalui serangkaian kegiatan dimulai dari koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan analisa kebijakan, baik tingkat pusat/daerah maupun sektoral/lintas sektoral. Selanjutnya, koordinasi yang melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan terus dilakukan untuk menangani permasalahan mendesak dan berskala besar, sesuai penugasan dari Presiden atau Pemerintah dalam bidang perencanaan.

Dalam melaksanakan tugas kelembagaan, selalu berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan menjaga akuntabilitas. Ukuran pencapaian kualitas akuntabilitas keuangan diupayakan terus untuk mendapatkan opini terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Disamping itu, melalui Program Reformasi Birokrasi, upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada publik dan masyarakat, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta meningkatkan kapasitas serta akuntabilitas kinerja terus dilaksanakan secara konsisten.

Selama periode 2010-2014, pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian kerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan ruang untuk terus diperbaiki, antara lain meningkatkan keselarasan (*inconsistency*) antara rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) maupun tahunan (RKP) dengan pelaksanaannya baik di pemerintah pusat (Renstra, Renja) maupun pemerintahan daerah (RPJMD, RKPd). Dalam hal ini, peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai pemangku kebijakan, *think-tank*, koordinator dan administrator masih dapat terus ditingkatkan khususnya dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional yang konsisten dan dapat menjawab tantangan baik dari dalam (nasional) maupun dari luar (internasional). Faktor-faktor yang dapat menjadi ruang penyempurnaan peran Kementerian PPN/Bappenas antara lain: (i) peningkatan kapasitas

kelembagaan dan SDM aparatur perencana di tingkat pusat dan daerah, (ii) peningkatan kualitas pedoman penyusunan perencanaan pembangunan nasional maupun kapasitas untuk melaksanakannya, (iii) mengoptimalkan hasil monitoring dan evaluasi sebagai masukan yang efektif dalam proses perencanaan, (iv) pelaksanaan kajian kebijakan dan pemanfaatannya mendukung kualitas perencanaan nasional (*evidence based policy*).

B. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres No. 13 Tahun 2014, Kementerian PPN termasuk kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Tugas Kementerian PPN dalam Perpres tersebut adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kementerian PPN menggunakan unit organisasi dan sumber daya Bappenas, seperti tercantum dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan menjalankan 9 (sembilan) fungsi sebagai berikut.

<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional• Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)• Pengkajian kebijakan pemerintah di bidang PPN• Penyusunan program pembangunan sebagai bahan penyusunan RAPBN yang dilaksanakan bersama dengan Kemenkeu dan Menteri PPN• Koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan dengan instansi terkait.• Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan tugas BAPPENAS• Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang PPN• Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden• Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

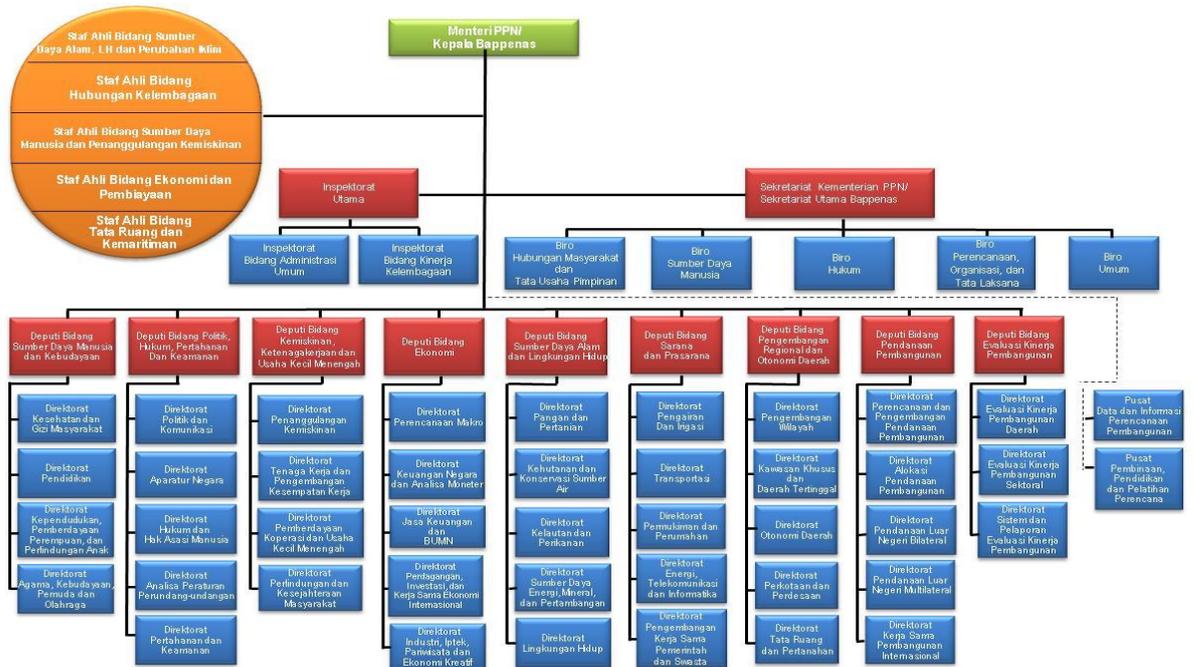
Mengacu pada tugas dan fungsi di atas, pelaksanaan tugas mengerucut menjadi 4 (empat) peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai (1) pengambil kebijakan/keputusan (*policy maker*), (2) koordinator, (3) *think-tank*, dan (4) administrator. Penjabaran peran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Penjabaran Peran Kementerian PPN/Bappenas

PERAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL			
Pengambil Keputusan (policy/decision maker)	Think Tank	Koordinator	Administrator
<p>PENJABARAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan: penyusunan rencana pembangunan nasional jangka panjang, menengah, pendek/ tahunan. Penganggaran: penyusunan alokasi pen-danaan (indikatif) sebagai bahan penyusunan RAPBN bersama dengan Depkeu. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Pengambilan keputusan dalam penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar, sesuai penugasan. 	<p>PENJABARAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengkajian kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, dan kebijakan lainnya. Fasilitasi pembinaan instansi/unit perencanaan di pusat dan di daerah. Kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi. 	<p>PENJABARAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan. Koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta peng-alokasian dana pembangunan bersama K/L terkait. Koordinasi kegiatan strategis penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar, sesuai penugasan. 	<p>PENJABARAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengelolaan dokumen perencanaan termasuk pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN). Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas No. PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2014, secara garis besar struktur organisasi Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut.

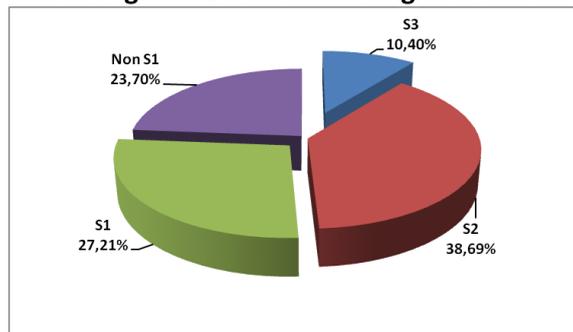
Gambar 1
Struktur Organisasi Kementerian PPN/Bappenas



Pada tahun 2014, jumlah sumber daya manusia sebanyak 858 orang, terdiri atas 796 pegawai organik, 8 pegawai perbantuan, dan 54 pegawai diperbantukan. Dari sejumlah itu, 86 orang (atau 10,40%) berpendidikan Doktor (S3); 320 orang (38,69%) Master (S2), 225 orang (27,21%) berpendidikan Sarjana (S1), dan 196 orang (23,70%) Sarjana Muda/D3, SLTA, dan SLTP/SD (Gambar 2). Jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural sebanyak 247 orang, fungsional perencana dan staf sebanyak 557 orang, dan pegawai yang diperbantukan di instansi lain dengan berbagai jabatan sebanyak 54 orang.

Gambar 2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Dari sisi dukungan alokasi anggaran, untuk mencapai kinerja tersebut pada tahun 2014 dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.055,55 miliar yang terbagi dalam (1) Program perencanaan pembangunan nasional; (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas; dan (4) Program pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur.

Program Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai program utama bertujuan untuk mencapai tujuan pertama dan kedua yaitu untuk (1) mewujudkan rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas; dan (2) mewujudkan koordinasi kebijakan pembangunan lainnya sesuai peran Kementerian PPN/Bappenas. Sedangkan tiga program lainnya sebagai program pendukung bertujuan untuk mencapai peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas. Rincian alokasi dari masing-masing program adalah sebagai berikut.

Tabel 3
Alokasi Anggaran Tahun 2014

(Rp miliar)

Jenis Program	Program	RM	Pinjaman	Hibah	Total
Program Utama	Perencanaan Pembangunan Nasional	187,95	67,78	178,51	434,25
Program Pendukung	1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	307,98	272,92	3,10	584,00
	2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas	33,00	-	-	33,00
	3. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas	4,30	-	-	4,30
Jumlah		533,23	340,70	181,61	1.055,55

Sumber : DIPA Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2014

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Visi dan Misi Kementerian PPN/Bappenas dituangkan dalam Renstra 2010-2014 adalah sebagai berikut.

Gambar 3
Visi dan Misi Kementerian PPN/Bappenas



Kualitas rencana pembangunan diwujudkan dengan melihat adanya: 1) tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; 2) integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; 3) keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; serta 4) integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) dengan tujuan pembangunan di tingkat pusat dan daerah yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan (Renstra/Renja, Kementerian/Lembaga dan RPJMD/RKPD/Renstra SKPD).

Koordinasi kebijakan pembangunan lainnya sesuai peran Kementerian PPN/Bappenas dicerminkan dari keberhasilannya dalam melaksanakan tugas-tugas lainnya dari Presiden/Pemerintah. Hal tersebut akan diukur dari tingkat keberhasilan pelaksanaan dan pemanfaatan tugas-tugas oleh Pemerintah. Selanjutnya, peningkatan kapasitas kelembagaan menggambarkan upaya dan pencapaian hasil program Reformasi Birokrasi, serta pencapaian akuntabilitas keuangan dan kinerja. Dengan demikian upaya untuk menjadi lembaga yang akuntabel dapat terukur dengan jelas.

Sebagai tindak lanjut penyempurnaan terhadap tata kelola akuntabilitas kinerja, pada tahun 2014 dilakukan penajaman terhadap sasaran strategis dan rumusan indikator kinerja. Selain itu, untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dilakukan pemantauan secara berkala dan berjenjang

terhadap unit kerja eselon II, unit kerja eselon I, sampai tingkat lembaga yang didukung oleh aplikasi *e-performance*. Hal tersebut dilakukan agar sasaran dan indikator kinerja lebih mencerminkan berbagai capaian kinerja oleh setiap unit kerja. Kontribusi setiap unit kerja menjadi lebih mudah diukur dengan proses yang transparan sehingga hasil pengukuran kinerja akan terjaga validitasnya. Penyempurnaan sasaran strategis dan indikator kinerja adalah sebagai berikut.

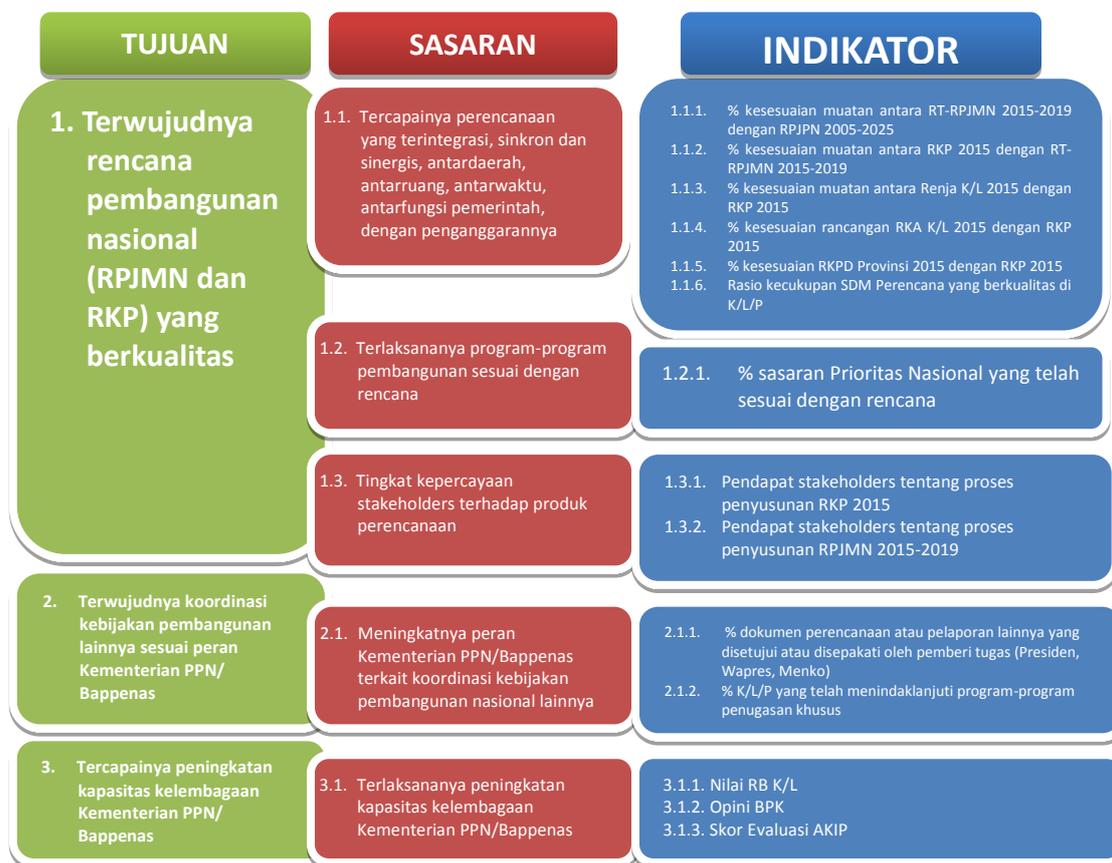
Tabel 4
Sandingan Penyempurnaan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2014

LAMA			BARU (PENYEMPURNAAN)		
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarkwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan (Kesesuaian RPJMN dan RKP 2014 dengan Renja dan RKA K/L 2014)	1. RPJMN 2010-2014 dan RKP tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur	100%	Tercapainya perencanaan yang terintegrasi, sinkron dan sinergis antardaerah, antarruang, antarkwaktu, antarfungsi pemerintah dengan penganggarannya	1. % kesesuaian muatan antara RT RPJMN 2015-2019 dengan RPJPN 2005-2025	97%
	2. % kesesuaian antara muatan rancangan RKP 2015 dengan RPJMN 2015-2019	100%		2. % kesesuaian muatan antara RKP 2015 dengan RT-RPJMN 2015-2019	96%
	3. % kesesuaian rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) 2015 dengan rancangan RKP 2015	100%		3. % kesesuaian muatan antara Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja K/L) 2015 dengan RKP 2015	90%
	4. % kesesuaian rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA K/L) 2015 dengan target dan sasaran rancangan RKP 2015	100%		4. % kesesuaian rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA K/L) 2015 dengan RKP 2015	85%
	5. % sasaran Prioritas Nasional yang telah sesuai dengan rencana	100%		5. % kesesuaian RKP Provinsi 2014 dengan RKP 2014	50%
	6. Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RKP 2015 dan RPJMN 2015-2019	Baik		6. Rasio kecukupan SDM perencana berkualitas di K/L/P tahun 2014	1,2
			Terlaksananya program-program pembangunan sesuai dengan rencana	% Sasaran Prioritas Nasional yang telah sesuai dengan rencana	90%
			Tingkat kepercayaan stakeholders terhadap produk perencanaan	1. Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RKP 2015	Baik
				2. Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RPJMN 2015-2019	Baik
Meningkatnya peran Kementerian PPN/Bappenas terkait koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya	Tingkat keberhasilan pelaksanaan koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya sesuai peran Kementerian PPN/Bappenas	90%	Meningkatnya peran Kementerian PPN/Bappenas terkait koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya	1. % dokumen perencanaan atau pelaporan lainnya yang disetujui atau disepakati oleh pemberi tugas (Presiden, Wapres, Menko)	95%
				2. % K/L/P yang telah menindaklanjuti program-program penugasan khusus	100%
Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas	1. % pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian PPN/Bappenas melalui penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM	100%	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas	1. Nilai RB K/L	90
	2. % fasilitasi dan pembinaan SDM aparatur perencana pusat dan daerah	100%		2. Opini BPK	WTP
	3. % ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas	100%		3. Skor Evaluasi AKIP	A
	4. Akuntabilitas Laporan Keuangan	WTP			
	5. Standar penilaian good governance	Baik			

Sumber : Hasil Penyempurnaan Penetapan Kinerja Tahun 2014

Dengan demikian, pada tahun 2014 Visi dan Misi tersebut dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran dan indikator sebagai berikut.

Gambar 4
Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2014



B. PENETAPAN KINERJA

Pada tahun 2014, telah ditetapkan kembali rencana kinerja tahunan sebagai penetapan kinerja tahun kelima dan sekaligus sebagai komitmen pimpinan untuk berkinerja dengan baik. Penetapan Kinerja tersebut mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra 2010-2014, sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

Tabel 5
Penetapan Kinerja Tahun 2014

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.1.	Tercapainya perencanaan yang terintegrasi, sinkron dan strategis, antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, dengan penganggarannya	1.1.1. % kesesuaian muatan antara RT-RPJMN 2015-2019 dengan RPJPN 2005-2025	97%
		1.1.2. % kesesuaian muatan antara RKP 2015 dengan RT-RPJMN 2015-2019	96%
		1.1.3. % kesesuaian muatan antara Renja K/L 2015 dengan RKP 2015	90%
		1.1.4. % kesesuaian rancangan RKA K/L 2015 dengan RKP 2015	85%
		1.1.5. % kesesuaian RKPD Provinsi 2015 dengan RKP 2015	50%
		1.1.6. Rasio Kecukupan SDM Perencana yang berkualitas di K/L/P	100%
1.2.	Terlaksananya program-program pembangunan sesuai dengan rencana	1.2.1. % sasaran Prioritas Nasional yang telah sesuai dengan rencana	90%
1.3.	Tingkat kepercayaan stakeholders terhadap produk perencanaan	1.3.1. Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RKP 2015	Baik
		1.3.2. Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RPJMN 2015-2019	Baik
2.1.	Meningkatnya peran Kementerian PPN/Bappenas terkait koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya	2.1.1. % dokumen perencanaan atau pelaporan lainnya yang disetujui atau disepakati oleh pemberi tugas (Presiden, Wapres, Menko)	95%
		2.1.2. % K/L/P yang telah menindaklanjuti program-program penugasan khusus	100%
3.1.	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas	3.1.1. Nilai RB K/L	90
		3.1.2. Opini BPK	WTP
		3.1.3. Skor Evaluasi AKIP	A

Dalam menentukan target dan pencapaian realisasi indikator kinerja tersebut, setiap unit kerja mempunyai peranan masing-masing seperti tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 6
Kontribusi Target dan Realisasi dari Unit kerja Eselon I

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	UNIT KERJA ESELON I										
		SDMK	Polhukhankam	Ekonomi	SDA LH	KKUKM	Sarpras	Regional	Pendanaan	EKP	Ses	Irtama
Tercapainya perencanaan yang terintegrasi, sinkron dan strategis, antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, dengan penganggarannya	% kesesuaian muatan antara RT-RPJM 2015-2019 dengan RPJPN 2005-2025	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-
	% kesesuaian muatan antara RKP 2015 dengan RT-RPJM 2015-2019	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-
	% kesesuaian muatan antara Renja K/L 2015 dengan RKP 2015	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-
	% kesesuaian rancangan RKA K/L 2015 dengan RKP 2015	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-
	% kesesuaian RKPD Provinsi 2015 dengan RKP 2015	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-
	Rasio Kecukupan SDM Perencana yang berkualitas di K/L/P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-
Terlaksananya program-program pembangunan sesuai dengan rencana	% sasaran Prioritas Nasional yang telah sesuai dengan rencana	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-
Tingkat kepercayaan stakeholders terhadap produk perencanaan	Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RKP 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√
	Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RPJMN 2015-2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√
Meningkatnya peran Kementerian PPN/Bappenas terkait koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya	% dokumen perencanaan atau pelaporan lainnya yang disetujui atau disepakati oleh pemberi tugas (Presiden, Wapres, Menko)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-
	% K/L/P yang telah menindaklanjuti program-program penugasan khusus	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-
Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas	Nilai RB K/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√
	Opini BPK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√
	Skor Evaluasi AKIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√

Keterangan: √ = Kontributor
√√ = Penanggung Jawab

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Tahun 2014 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Renstra 2010-2014, maka selain menjelaskan capaian kinerja tahun 2014, laporan ini akan menjelaskan pencapaian kinerja periode Renstra 2010-2014 dengan mengukur pencapaian tujuan Kementerian PPN/Bappenas yaitu:

1. Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas.
2. Terwujudnya koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya sesuai peran Kementerian PPN/Bappenas.
3. Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/ Bappenas.

Selama periode 2010-2014, tugas dan fungsi telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Selama tahun 2014, telah dihasilkan rancangan rencana pembangunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas, mewujudkan koordinasi kebijakan pembangunan lainnya sesuai perannya. Sedangkan dalam menjalankan peran sebagai pemangku kebijakan, koordinator, *think thank*, dan administrator, terus dilakukan perbaikan kapasitas, baik itu kapasitas kelembagaan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, penguatan sumber daya manusia aparatur perencana baik pusat maupun daerah, serta penyempurnaan pelaksanaan administrasi perencanaan pembangunan. Pencapaian kinerja menunjukkan peningkatan kualitas hasil dengan pencapaian yang terus meningkat sampai dengan tahun terakhir Renstra 2010-2014.

A. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Untuk mewujudkan tujuan organisasi, pada tahun 2014 telah ditetapkan 5 (lima) sasaran strategis dan target indikator kinerja sesuai dengan masing-masing sasaran strategis. Sasaran ini merupakan hasil penajaman sasaran strategis tahun 2010-2013. Capaian kinerja tahun 2014 merupakan akumulasi dari kontribusi capaian kinerja dari setiap unit kerja seperti yang dijelaskan pada Tabel 6. Hasil pencapaian target indikator kinerja tahun 2014 terdapat pada Tabel 7.

Selama periode 2010-2014, Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan tugas dan fungsinya, serta mewujudkan tujuan organisasi. Adapun rincian capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas dari masing-masing sasaran strategis dan tujuan dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 7
Hasil Capaian Kinerja Tahun 2014

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1.1	Tercapainya perencanaan yang terintegrasi, sinkron dan sinergis, antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, dengan penganggarannya	1.1.1 % kesesuaian muatan antara RT-RPJMN 2015-2019 dengan RPJPN 2005-2025	97%	97%	100
		1.1.2. % kesesuaian muatan antara RKP 2015 dengan RT-RPJMN 2015-2019	96%	96%	100
		1.1.3. % kesesuaian muatan antara Renja K/L 2015 dengan RKP 2015	90%	90%	100
		1.1.4. % kesesuaian rancangan RKA K/L 2015 dengan RKP 2015	85%	82,6%	97,2
		1.1.5. % kesesuaian RKPDP Provinsi 2015 dengan RKP 2015	50%	35%	70
		1.1.6. Rasio Kecukupan SDM Perencana yang berkualitas di K/L/P	1,2	1,1	91,7
1.2	Terlaksananya program-program pembangunan sesuai dengan rencana	1.2.1. % sasaran Prioritas Nasional yang telah sesuai dengan rencana	90%	87,7%	97,4
1.3	Tingkat kepercayaan stakeholders terhadap produk perencanaan	1.3.1. Pendapat <i>stakeholders</i> tentang proses penyusunan RKP 2015	Baik	Sangat Baik	>100
		1.3.2. Pendapat <i>stakeholders</i> tentang proses penyusunan RPJMN 2015-2019	Baik	Baik	100
2.1	Meningkatnya peran Kementerian PPN/Bappenas terkait koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya	2.1.1. % dokumen perencanaan atau pelaporan lainnya yang disetujui atau disepakati oleh pemberi tugas (Presiden, Wapres, Menko)	95%	95%	100
		2.1.2. % K/L/P yang telah menindaklanjuti program-program penugasan khusus	100%	100%	100
3.1	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas	3.1.1. Nilai RB K/L	90	89,3	99,2
		3.1.2. Opini BPK	WTP	WTP	100
		3.1.3. Skor Evaluasi AKIP	A	A	100

1

Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas

SASARAN
STRATEGIS
1.1

Tercapainya perencanaan yang terintegrasi, sinkron dan sinergis, antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, dengan penganggarannya

Rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas telah terwujud dengan melakukan perencanaan yang terintegrasi, sinkron dan sinergis, antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, dengan penganggarannya.

Pada Tahun 2014, telah disusun RPJMN 2015-2019. RPJMN 2015-2019 ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden ke dalam strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program prioritas Presiden, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal.

Dalam penyusunannya, RPJMN 2015-2019 melalui serangkaian tahapan yang dimulai dari penyusunan *background study* sebagai bahan dalam penyusunan Rancangan Teknokratik (RT) RPJMN. Selanjutnya, RT-RPJMN tersebut disesuaikan dengan visi-misi presiden terpilih. Disamping itu, RPJMN juga mempertimbangkan dan mengakomodir masukan-masukan dari berbagai pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik (mengikutsertakan Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat Sipil, dan Organisasi Profesi) serta pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) RPJMN regional yang dilakukan di beberapa wilayah dan musrenbang Nasional RPJMN yang dihadiri oleh Presiden.

Disamping menyusun RT-RPJMN juga bertanggung jawab menyusun dokumen RKP 2015. Rancangan Dokumen RKP 2015 tersebut ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 pada tanggal 16 Mei 2014. Rancangan dokumen RKP 2015 memuat Tema: *"Melanjutkan Reformasi Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan"*, dengan jumlah 25 (dua puluh lima) isu strategis, yang dikelompokkan dalam 9 (sembilan) bidang pembangunan yang digariskan dalam RPJPN 2005-2025.

RKP Tahun 2015 menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga (K/L) dalam menyusun Rencana Kerja K/L Tahun 2015, acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015, dan pedoman bagi pemerintah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2015, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peraturan pemerintah dari turunannya.

Untuk menghasilkan Rancangan Dokumen RKP Tahun 2015 yang berkualitas, telah dilaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Rancangan dokumen RKP 2015 tersebut dihasilkan melalui suatu tahapan atau proses penyusunan RKP 2015, dimulai dari Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (Rakorbangpus), Musyawarah Perencanaan

Pembangunan tingkat Provinsi (Musrenbangprov), Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Nasional (Pra-Musrenbangnas), Musrenbangnas, dan Pasca Musrenbangnas serta rapat-rapat lainnya di tingkat teknis, baik secara bilateral (antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Kementerian/Lembaga-K/L) maupun trilateral (antara Kementerian PPN/Bappenas dengan K/L dan Kemenkeu). Selanjutnya rancangan dokumen RKP 2015 tersebut menjadi arah kebijakan pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional jangka pendek.

Untuk meningkatkan kualitas RKP pada periode 2010-2014, setiap tahunnya telah dilakukan penyempurnaan melalui revitalisasi Musrenbangnas yang mulai diimplementasikan pada tahun 2011 dan terus berlanjut sampai dengan tahun 2014. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya proporsi program dan kegiatan yang disepakati dan tingkat kepastian hasil-hasil Musrenbangnas untuk tahapan penyusunan anggaran selanjutnya, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam pelaksanaannya telah dilakukan beberapa langkah solusi untuk mengatasi 7 (tujuh) titik kritis penyelenggaraan Musrenbangnas. Selain itu, dilakukan pula evaluasi melalui survei untuk mengetahui pendapat *stakeholders* terhadap proses penyusunan RKP. Dengan demikian, kualitas dokumen perencanaan (RKP) yang telah dihasilkan selama periode 2010-2014 semakin baik.

Untuk mengetahui hasil pengukuran kualitas perencanaan pembangunan telah ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja yang diharapkan dapat menjelaskan pencapaian kinerja sasaran strategis, sebagaimana penjelasan berikut ini.



Indikator Kinerja “% Kesesuaian muatan antara RT- RPJM 2015-2019 dengan RPJPN 2005-2025” diukur melalui analisis kesesuaian muatan yang mencakup Sasaran Pokok, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan yang dirumuskan dalam RT-RPJM terhadap Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan dalam RPJPN. Target kinerja ini hanya ditetapkan satu kali dalam periode 5 (lima) tahun.

Analisis kesesuaian dilakukan dengan berdasarkan kelompok bidang pembangunan nasional yang menjadi ruang lingkup tugas penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional pada kedeputan di Kementerian PPN/Bappenas. Metodologi dalam pengukuran indikator kinerja ini dilakukan dengan cara menyandingkan, menganalisis, mereviu substansi yang termuat dalam RT-RPJM 2015-2019 dengan RPJPN 2005-2025, dengan bantuan kertas kerja dari masing-masing unit kerja eselon I sebagai alat analisis.

Pada prinsipnya penyusunan RT-RPJM 2015-2019 dilakukan dengan mengacu antara lain: 1) Arah pembangunan yang terdapat dalam RPJPN 2005-2025; 2) Hasil evaluasi pelaksanaan RPJM 2010-2014; 3) Hasil kajian *Background Study* Penyusunan RPJM 2015-2019. Sehingga, muatan RT-RPJM 2015-2019 telah mengakomodasi secara penuh amanat RPJPN 2005-2025. Namun

demikian, mengingat perkembangan lingkungan strategis bahwa substansi RT-RPJMN 2015-2019 juga mengakomodasi perkembangan kehidupan kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara yang dinamis. Perbedaan yang mungkin terjadi hanyalah pada penekanan atas pentahapan pembangunan nasional yang telah tercantum dalam RPJPN 2005-2025, karena beberapa pentahapan yang ditujukan pada RPJMN sebelumnya belum tercapai secara optimal, sehingga masih diperlukan upaya-upaya untuk kesinambungan pembenahannya.

Amanat dari RPJPN 2005-2025 sering dijabarkan dalam RPJMN 2015-2019 lebih dari 1 (satu) prioritas bidang. Sehingga untuk menunjukkan kesesuaian antara amanat dengan prioritas bidang yang ada, dibuat matrik kesesuaian dari semua unit kerja eselon I yang menunjukkan interaksi dari amanat RPJPN 2005-2015 dengan RPJMN 2015-2019 yang mencakup Sasaran Pokok, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan. Sebagai contoh matrik berikut menjelaskan amanat RPJPN terkait dengan prioritas bidang di dalam RT-RPJMN 2015-2109 dari 3 (tiga) unit kerja eselon I.

Tabel 8
Pemetaan Kesesuaian Muatan RT-RPJMN 2015-2019 dengan RPJPN 2005-2025

NO	UKE I	ASPEK	RT-RPJMN 2015-2019	RPJPN 2005-2025	KET
1	SDA LH	Sasaran Pokok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. 2. Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga. 3. Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (2019) 	Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga.	Sesuai
		Arah Kebijakan	Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat, serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan.	Pembangunan yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa di berbagai wilayah Indonesia akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya Indonesia yang maju, mandiri dan adil.	Sesuai
		Strategi Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketersediaan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri 2. Peningkatan Kualitas Distribusi Pangan dan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pangan 3. Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat 4. Mitigasi Gangguan Terhadap Ketahanan Pangan 	Sistem ketahanan pangan diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan nasional dengan mengembangkan kemampuan produksi dalam negeri yg didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yg terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.	Sesuai

NO	UKE I	ASPEK	RT-RPJMN 2015-2019	RPJPN 2005-2025	KET
2	POLHUK-HANKAM	Sasaran Pokok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas demokrasi substansial, ditandai dengan meningkatnya indeks Demokrasi Indonesia dan tingkat partisipasi politik rakyat serta menguatnya kepemimpinan dan peran Indonesia dalam berbagai kerja sama dan forum internasional. 2. Terwujudnya sistem peradilan pidana dan perdata yang efisien, efektif, dan akuntabel bagi pencari keadilan, serta didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas, dan operasional yang memadai, mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara, serta menurunnya tingkat korupsi dan meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan; 2. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. 	Sesuai
		Arah Kebijakan	Menyiapkan Landasan Pembangunan yang Kokoh. yang dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien; meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, dan meningkatnya peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum 2. Mewujudkan Indonesia yang aman, damai dan bersatu 	Sesuai
		Strategi Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan; 2. Upaya meningkatkan penegakan hukum di seluruh bidang pembangunan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reformasi Hukum dan Birokrasi; 2. Memantapkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; 	Sesuai
3	EKONOMI	Sasaran Pokok	Pertumbuhan ekonomi 6-8 % terutama didukung oleh industri yang mempunyai nilai tambah tinggi	Perekonomian dikembangkan dengan memperkuat perekonomian domestik dan berdaya saing global	Sesuai
		Arah Kebijakan	Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, melalui peningkatan alokasi belanja negara yang memberikan pengaruh pengganda (multiplier effect) yang tinggi bagi perekonomian, khususnya investasi pemerintah yang meningkat dari 4,1 % PDB menjadi 5,8 % PDB pada tahun 2019	Perbaikan pengelolaan keuangan negara bertumpu pada sistem anggaran yang transparan dan bertanggung jawab	Sesuai
		Strategi Pembangunan	Transformasi ekonomi melalui industrialisasi berkelanjutan (green secara bertahap) dan penguasaan iptek.	Struktur perekonomian diperkuat dengan mendukung sektor industri sebagai motor penggerak.	Sesuai

Berdasarkan persandingan yang dilakukan sesuai kelompok pembangunan nasional dari masing-masing unit kerja eselon I, maka dapat disimpulkan bahwa “kesesuaian muatan antara RT-RPJMN 2015-2019 dengan RPJPN 2005-2025” capaian kinerjanya adalah 100 % (realisasi 97 % dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 97%).

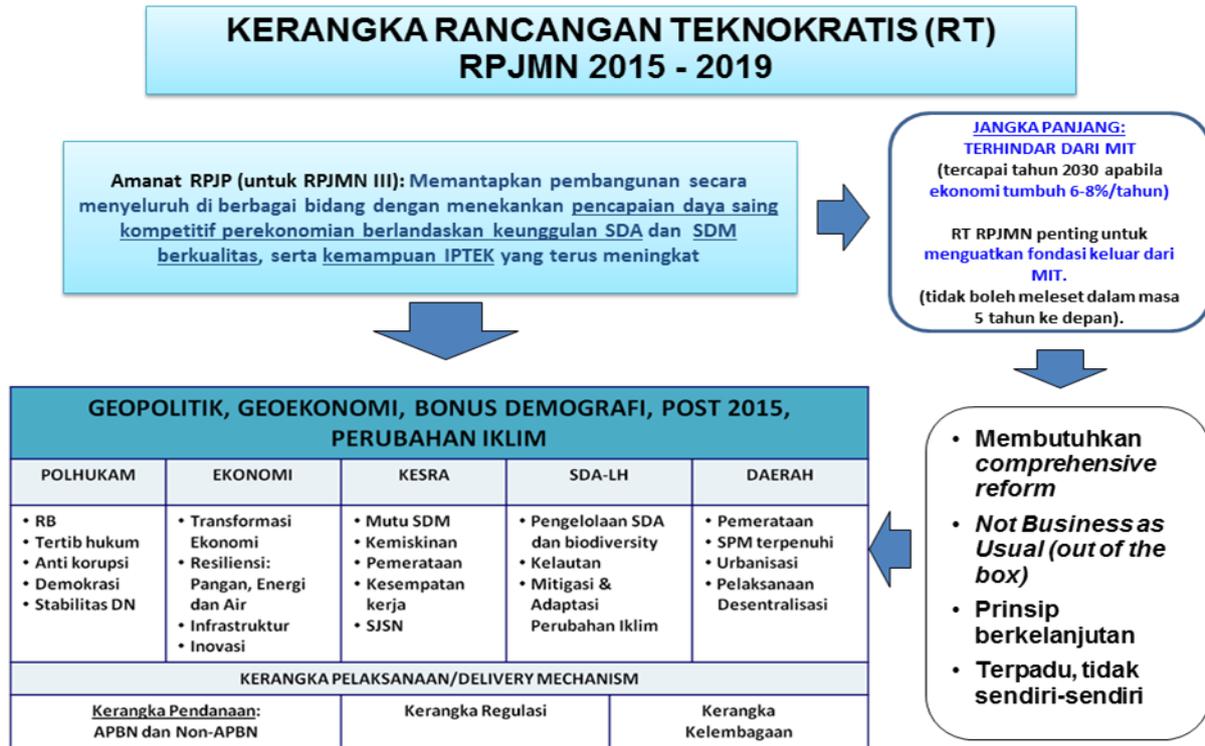


Indikator Kinerja “ % Kesesuaian antara muatan rancangan RKP 2015 dengan target/sasaran dalam RPJMN 2015-2019” merupakan kesesuaian muatan prioritas nasional/bidang, sasaran, program dan indikator dari prioritas nasional dalam RKP 2015 terhadap fokus prioritas dalam RT-RPJMN 2015-2019. Pengukuran indikator dilakukan dengan cara menyangdingkan dan menganalisa RKP 2015 dengan RT-RPJMN 2015-2019.

Proses penyusunan RKP 2015 dilakukan secara bersamaan waktunya dengan penyusunan RT-RPJMN 2015-2019. Rancangan RKP 2015 merupakan rencana kerja tahun pertama dari RPJMN 2015-2019. Oleh karena itu, secara substansi muatan yang terkandung dalam RKP 2015 merupakan penjabaran atau tahapan dari RPJMN 2015-2019. Agenda lima tahunan yang tertuang dalam RT-RPJMN 2015-2019 telah berhasil secara sinkron dan sinergi dituangkan dalam rencana kerja tahunan melalui koordinasi yang erat dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga terkait. Dalam rancangan RKP 2015, penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang menjadi prioritas nasional, dituangkan menurut bidang pembangunan, yakni: (i) bidang sosial budaya dan kehidupan beragama; (ii) bidang ekonomi; (iii) bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; (iv) bidang sarana dan prasarana; (v) bidang politik; (vi) bidang pertahanan dan keamanan; (viii) bidang hukum dan aparatur; (ix) bidang wilayah dan tata ruang; serta diperkuat pula melalui kebijakan pengarusutamaan dan lintas bidang yang menghubungkan berbagai isu strategis pembangunan yang bersifat lintas bidang dan saling memiliki keterkaitan.

Sedangkan dalam RT-RPJMN 2015-2019, penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang menjadi prioritas nasional dituangkan dalam agenda pembangunan: (i) ekonomi; (ii) pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (iii) Polhukhankam; (iv) kesejahteraan rakyat; (v) wilayah; dan (vi) kelautan. Penyusunan agenda pembangunan ini tidak terlepas dari kerangka pikir RT-RPJMN 2015-2019 yang mengakomodasikan berbagai isu strategis dan perkembangan lingkungan global, nasional dan lokal. Terdapat beberapa isu strategis yang sangat diperhatikan dalam penyusunan RT-RPJMN 2015-2019 ini yakni perkembangan geopolitik, geoekonomi, bonus demografi, agenda post 2015 dan perubahan iklim. Di sisi lain, kerangka penyusunan RT-RPJMN menggunakan 3 pendekatan, yakni kerangka pendanaan, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan seperti terdapat dalam gambar berikut.

Gambar 5
Kerangka Pikir RT-RPJMN 2015-2019



Seperti telah dijelaskan bahwa proses penyusunan RKP 2015 dilakukan secara bersamaan waktunya dengan proses atau tahapan penyusunan RT-RPJMN 2015-2019. Oleh karena itu, secara substansi muatan khususnya program dan kegiatan yang masuk kategori prioritas nasional yang terkandung dalam RKP 2015 merupakan penjabaran atau tahapan dari RT-RPJMN 2015-2019. Pada tahapan berikutnya, penjabaran lebih lanjut RPJMN 2015-2019 ke RKP 2015 dilakukan melalui proses revisi atas RKP 2015 guna menampung hal-hal baru di dalam RPJMN yang belum tertampung dalam RKP 2015.

Terkait dengan hal tersebut, di bawah ini contoh analisis pemetaan tingkat kesesuaian perumusan kegiatan dalam RKP 2015 dengan RT-RPJMN 2015-2019 yang terkait dengan pembangunan beberapa bidang di 3 (tiga) unit kerja eselon I.

Tabel 9
Pemetaan Kesesuaian Muatan RKP 2015 dengan RT-RPJMN 2015-2019

NO	UKE I	ASPEK	RKP 2015	RT-RPJMN 2015-2019	KET
1	SDM DAN KEBUDAYAAN	Sasaran	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Sesuai
		Program	Bimbingan Masyarakat Islam	Bimbingan Masyarakat Islam	Sesuai
		Indikator	Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non PNS	Jumlah penyuluh agama yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan	Sesuai
2	POLHUKHANKAM	Sasaran	Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Sesuai
		Program	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Sesuai
		Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Program Pembangunan Integritas pada Mitra Strategis Sektor Pendidikan 2. Terlaksananya Program Pembangunan Integritas pada Mitra Strategis (CSO) 3. Terlaksananya Program Pembangunan Integritas pada Kementerian/Lembaga/Instansi (K/L/I) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Program Pembangunan Integritas pada Mitra Strategis Sektor Pendidikan 2. Terlaksananya Program Pembangunan Integritas pada Mitra Strategis (CSO) 3. Terlaksananya Program Pembangunan Integritas pada Kementerian/Lembaga/Instansi (K/L/I) 	Sesuai
3	SDA LH	Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya peningkatan produksi bahan pangan utama 2. Tercapainya peningkatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). 3. Tercapainya konsumsi kalori pada tahun 2015 minimal mencapai 2.011 kkal/kapita/hari 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri 2. Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan 3. Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan 	Sesuai
		Program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 2. Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternak Rakyat 3. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 2. Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternak Rakyat 3. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 	Sesuai
		Indikator	Produksi padi, kedelai, jagung, gula, daging sapi, konsumsi kalori, dan skor pola pangan harapan	Produksi padi, kedelai, jagung, gula, daging sapi, konsumsi kalori, dan skor pola pangan harapan	Sesuai

Berdasarkan pemetaan di atas, maka dapat tergambarkan adanya konsistensi yang jelas antara program/kegiatan prioritas pada RT-RPJMN 2015-2019 dengan RKP 2015. Dengan persandingan yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja eselon I, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan capaian kinerja kesesuaian muatan antara RKP 2015 dengan RT-RPJMN 2015-2019 adalah sebesar 100 % (realisasi 96 % dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 96 %).



Rancangan Renja K/L 2015 telah disusun berdasarkan pedoman pada RKP 2015. Kesesuaian muatan antara Renja K/L 2015 dengan RKP 2015 merupakan kesesuaian muatan Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator dari Renja K/L 2015 dengan Rancangan RKP 2015. Dokumen yang dipakai untuk analisis adalah Dokumen Kesepakatan *Trilateral Meeting*, apabila belum mendapatkan dokumen Renja. Pengukuran indikator dilakukan dengan cara menyandingkan dan menganalisa Renja K/L 2015 dengan RKP 2015, khususnya Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator untuk Prioritas Nasional dan Prioritas Bidang.

Dalam pelaksanaannya, telah dilaksanakan koordinasi lebih lanjut dengan mitra kerja Kementerian/Lembaga sehingga penguangan rencana kerja tahunan tersebut dapat dijabarkan dalam Renja-KL secara konsisten. Penyesuaian dan penyelarasan Renja K/L dengan RKP dan pagu indikatif dilakukan melalui mekanisme "*trilateral meeting*" yang melibatkan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait. Hasil "*trilateral meeting*" berupa dokumen kesepakatan tiga pihak yang menjadi acuan Kementerian/Lembaga terkait dalam menyusun Renja K/L agar sejalan dan sesuai dengan sasaran dan target RKP.

Kementerian PPN/Bappenas telah berhasil mencapai konsistensi rencana pembangunan yang baik dan sinergi, yaitu tingkat kesesuaian muatan antara Renja K/L 2015 dengan RKP 2015 mencapai 100%. Secara substantif dokumen Renja K/L telah mengkomodasikan mandat yang tertuang dalam RKP 2015, khususnya untuk program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas Bidang, walaupun secara administratif terdapat beberapa hal yang harus dikonfirmasi dan disempurnakan. Capaian kinerja tingkat kesesuaian tersebut mencapai 100% dari tahun ke tahun selama periode 2010-2014.

Hasil pemetaan kesesuaian muatan Renja K/L 2015 dengan RKP 2015 telah dilakukan oleh setiap unit kerja eselon I, dan sebagai contoh pemetaan dari 3 (tiga) unit kerja eselon I terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 10
Pemetaan Kesesuaian Muatan Renja-K/L 2015 dengan RKP 2015

NO	KEDEPUTIAN	ASPEK	RENJA K/L	RKP 2015	KET
1	SDA LH	Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. terwujudnya pembangunan berkelanjutan serta terpenuhinya target penurunan emisi gas rumah kaca; 2. Turunnya tingkat dan beban pencemaran pada air, udara, dan tanah, serta terjaminnya keselamatan masyarakat dari bahan dan limbah bahan berbahaya dan beracun; 3. Terlindunginya fungsi produksi dan lindung ekosistem. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang tercermin dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 64,5; 2. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan 3. Menguatnya kapasitas pengelolaan lingkungan hidup. 	Sesuai
		Program	Pengembangan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	Pengembangan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	Sesuai
		Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami BMKG 2. Pengelolaan Meteorologi Publik BMKG 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami BMKG 2. Pengelolaan Meteorologi Publik BMKG 	Sesuai
		Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya ketaatan dan kualitas pengelolaan LH (beyond PROPER) industri manufaktur, prasarana dan jasa 2. Meningkatnya implementasi RAD perubahan iklim 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya ketaatan dan kualitas pengelolaan LH (beyond PROPER) industri manufaktur, prasarana dan jasa 2. Meningkatnya implementasi RAD perubahan iklim 	Sesuai
2	POLHUKHANKAM	Sasaran	Menguatnya kelembagaan demokrasi dengan capaian indeks aspek institusi demokrasi sebesar 71 pada tahun 2019, dan terselenggaranya pemilu serentak tahun 2019 yang aman, damai, adil jujur dan demokratis	Menguatnya kelembagaan demokrasi dengan capaian indeks aspek institusi demokrasi sebesar 71 pada tahun 2019, dan terselenggaranya pemilu serentak tahun 2019 yang aman, damai, adil jujur dan demokratis	Sesuai
		Program	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Sesuai
		Kegiatan	Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	Sesuai
		Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah rancangan peraturan KPU yang disusun berdasarkan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan 2. Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU 3. perundang-undangan penyelenggaraan Tahapan Pemilu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah rancangan peraturan KPU yang disusun berdasarkan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan 2. Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU 3. perundang-undangan penyelenggaraan Tahapan Pemilu 	Sesuai
3	SDM DAN KEBUDAYAAN	Sasaran	Meningkatnya perlindungan terhadap resiko finansial akibat masalah kesehatan	Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi resiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk terutama penduduk miskin	Sesuai
		Program	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	Sesuai
		Kegiatan	Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Sesuai
		Indikator	Tersalurnya dana PBI Kesehatan (persen)	Persentase penyaluran dana PBI kesehatan secara tepat waktu dan tepat jumlah	Sesuai



Indikator Kinerja “% Kesesuaian antara muatan rancangan RKA-K/L 2015 dengan RKP 2015” merupakan Rancangan RKA-K/L 2015 merupakan penjabaran dari Rancangan Renja K/L 2015 yang mengacu pada Rancangan RKP 2015. Pengukuran kesesuaian muatan rancangan RKA K/L 2015 dengan target/sasaran dalam Rancangan RKP 2015 berdasarkan atas output kegiatan prioritas dalam Rancangan RKA-K/L 2015 dibandingkan dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) prioritas dalam RKP 2015 sesuai dengan bidang/issue strategis masing-masing. Untuk menilai kesesuaian dilakukan pemetaan keterkaitan yang bertujuan untuk melihat seberapa besar IKK pada masing-masing kegiatan prioritas yang ada dalam dokumen RKP 2015 yang dapat dipetakan/diterjemahkan sesuai output pada masing-masing kegiatan yang ada pada dokumen RKA-K/L 2015, baik menyangkut substansi, nomenklatur maupun target atau volume dari kegiatan tersebut. Hal tersebut selanjutnya dapat mengindikasikan seberapa besar efektifitas pengalokasian anggaran terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Prioritas.

Untuk mengukur kesesuaian ini dilakukan melalui forum penelaahan RKA-K/L pada Pagu Anggaran. Berdasarkan penelaahan, terdapat kesesuaian antara sasaran, program dan kegiatan beserta indikator antara RKA-K/L dengan RKP, meskipun tidak seluruhnya sesuai dan harus dilakukan konfirmasi.

Kesesuaian tersebut dapat dijelaskan dengan hasil pemetaan atau reviu berdasarkan kriteria pemetaan terhadap IKK yang terbagi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Kriteria terpetakan, yang terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu:
 - Terpetakan Langsung, adalah kegiatan prioritas yang IKK-nya terkait langsung atau sama persis dengan output dari kegiatan prioritas yang ada dalam dokumen RKA-KL, baik terkait secara nomenklatur, substansi maupun target/volume kegiatan.
 - Terpetakan Tidak Langsung, kegiatan prioritas yang IKK Prioritas tidak terkait langsung secara nomenklatur, tetapi secara substansi ataupun target/volume kegiatannya terkait dengan output kegiatan yang ada di dokumen RKA- KL.
2. Kriteria tidak terpetakan, yaitu IKK Prioritas yang ada dalam RKP tidak terkait sama sekali/tidak dapat/sulit diterjemahkan dengan output kegiatan yang ada dalam RKA-KL, baik dari segi nomenklatur, substansi maupun target atau volume kegiatannya.

Berdasarkan hasil pemetaan keterkaitan IKK pada seluruh kegiatan prioritas dokumen RKP 2015 dan *Output* Kegiatan dalam dokumen RKA-KL 2015 yang telah dilakukan pada seluruh Prioritas Nasional, didapatkan beberapa catatan yang menunjukkan perubahan, baik berupa peningkatan maupun penurunan keterkaitan, bila dibandingkan dengan pemetaan keterkaitan RKP dengan RKA-KL pada tahun 2014.

Pada tahun 2014, kegiatan pemetaan keterkaitan Kegiatan Prioritas Antara RKP – RKA-KL 2014 yang dilakukan, IKK yang dapat dipetakan sebesar 87,4%, dan yang tidak terpetakan sebesar 12,6%. Pada hasil pemetaan IKK tahun 2015 terjadi penurunan, dimana IKK yang dapat dipetakan ke dalam RKA-KL 2015 sebesar 82,6%, dan yang tidak terpetakan sebesar 17,4% sebagaimana terdapat dalam Tabel 11.

Dalam melakukan pemetaan jumlah IKK dalam RKP 2015 kedalam dokumen RKA-K/L 2015 terdapat beberapa temuan/catatan yang memiliki implikasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap penurunan persentase keterkaitan dengan pemetaan tahun sebelumnya.

Adapun beberapa temuan/catatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya perubahan struktur organisasi beberapa kementerian/lembaga sebagai akibat perubahan tugas dan fungsi.
2. Terkait Indikator (IKK)
 - a. Satu IKK dalam RKP bisa terpetakan/terjabarkan kedalam lebih dari satu output di dokumen RKA-KL atau sebaliknya;
 - b. IKK dalam RKP yang tidak terpetakan “memiliki kemungkinan” terjabarkan pada output kegiatan lainnya di RKA-KL.
 - c. IKK dalam RKP hanya dijelaskan oleh output layanan perkantoran dalam RKA-K/L.
3. Terkait Pendanaan
 - a. Alokasi kegiatan RKP mengalami peningkatan dan penurunan dalam dokumen RKA-K/L.
 - b. Alokasi beberapa kegiatan dalam RKP terletak pada indikator pertama (alokasi tidak dapat dipecah ke masing-masing Indikator).
 - c. Alokasi Kegiatan di RKP menjadi “0” di dokumen RKA-K/L.
 - d. Alokasi Kegiatan dalam RKP ada yang dialokasikan melalui belanja Non KL (BA BUN).

Walaupun terjadi sedikit penurunan prosentase yang terpetakan jumlah IKK kegiatan prioritas dalam RKP 2015 ke dalam dokumen RKA-KL 2015, namun capaian kinerja kesesuaian rancangan RKA-K/L 2015 dengan RKP 2015 sudah tercapai sebesar 97,2 % (realisasi 82,6 % dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 85 %).

Tabel 11

REKAPITULASI DAN HASIL PEMETAAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) RENCANA TINDAK ISU STRATEGIS RKP 2015 BERDASARKAN ISU STRATEGIS PER BIDANG (JUTA RUPIAH)

KODE	BIDANG / ISU STRATEGIS	RKP 2015	RKA-KL 2015 dan BA BUN	SELISIH			(%)			Pemetaan IKK Dalam RKP Thd. RKA-KL			JML IKK	(%)	
				TAMBAH/ KURANG	TIDAK TERTAMPUNG	TOTAL	TAMBAH/ KURANG	TIDAK TERTAMPUNG	TOTAL	L	TL	TTP		TP	TTP
01.	Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama	168.528.138,2	176.363.591,8	7.905.084,8	(69.631)	7.835.454	4,7	0,0	4,6	95	42	15	152	90,1	9,9
01.01	1. Reformasi Pembangunan Kesehatan	24.863.647,5	32.857.687,4	7.994.039,9		7.994.039,9	32,2	0,0	32,2	13	8	0	21	100,0	0,0
01.02	2. Pengendalian Jumlah Penduduk	1.529.801,0	730.934,2	(798.866,8)		(798.866,8)	-52,2	0,0	-52,2	4	5	1	10	90,0	10,0
01.03	3. Reformasi Pembangunan Pendidikan	63.060.300,0	63.221.684,0	161.384,0		161.384,0	0,3	0,0	0,3	34	15	8	57	86,0	14,0
01.04	4. Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	79.074.389,7	79.553.286,2	548.527,7	(69.631,2)	478.896,5	0,7	-0,1	0,6	44	14	6	64	90,6	9,4
02.	Bidang Ekonomi	20.626.299,4	21.356.925,8	815.092,4	(84.466,0)	730.626,4	4,0	-0,4	3,5	310	101	27	438	93,8	6,2
02.05	5. Reformasi Keuangan Negara	6.745.700,0	6.839.827,1	94.127,1		94.127,1	1,4	0,0	1,4	5	7	0	12	100,0	0,0
02.06	6. Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas	2.890.736,0	2.998.531,1	192.261,1	(84.466,0)	107.795,1	6,7	-2,9	3,7	198	63	23	284	91,9	8,1
02.07	7. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	6.773.269,5	6.593.649,5	(179.620,0)		(179.620,0)	-2,7	0,0	-2,7	37	3	1	41	97,6	2,4
02.08	8. Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi	1.278.900,0	1.259.964,5	(18.935,5)		(18.935,5)	-1,5	0,0	-1,5	23	8	1	32	96,9	3,1
02.09	9. Peningkatan Daya saing UMKM dan Koperasi	2.937.693,9	3.664.953,6	727.259,7		727.259,7	24,8	0,0	24,8	47	20	2	69	97,1	2,9
03.	Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	3.053.630,4	2.313.875,4	(665.171,5)	(74.583,5)	(739.755,0)	-21,8	-2,4	-24,2	134	84	57	275	79,3	20,7
03.10	10. Peningkatan Kapasitas IPTEK	3.053.630,4	2.313.875,4	(665.171,5)	(74.583,5)	(739.755,0)	-21,8	-2,4	-24,2	134	84	57	275	79,3	20,7
04.	Bidang Politik	653.966,8	825.942,0	171.975,2	-	171.975,2	26,3	0,0	26,3	41	19	20	80	75,0	25,0
04.11	11. Konsolidasi Demokrasi	653.966,8	825.942,0	171.975,2	-	171.975,2	26,3	0,0	26,3	41	19	20	80	75,0	25,0
05.	Bidang Pertahanan dan Keamanan	42.215.092,0	43.490.350,9	1.325.188,9	(49.930,0)	1.275.258,9	3,1	-0,1	3,0	31	12	38	81	53,1	46,9
05.12	12. Percepatan Pembangunan MEF dengan Pemberdayaan Industri Pertahanan	34.082.332,1	35.386.729,4	1.304.397,3		1.304.397,3	3,8	0,0	3,8	10	8	3	21	85,7	14,3
05.13	13. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri	8.132.759,9	8.103.621,5	20.791,6	(49.930,0)	(29.138,4)	0,3	-0,6	-0,4	21	4	35	60	41,7	58,3
06.	Bidang Hukum dan Aparatur	907.400,0	1.229.794,2	322.394,2	-	322.394,2	35,5	0,0	35,5	79	22	9	110	91,8	8,2
06.14	14. Reformasi Birokrasi dan peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik	451.100,0	780.087,4	328.987,4	-	328.987,4	72,9	0,0	72,9	47	20	6	73	91,8	8,2
06.15	15. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	456.300,0	449.706,8	(6.593,2)	-	(6.593,2)	-1,4	0,0	-1,4	32	2	3	37	91,9	8,1
07.	Bidang Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	32.845.747,4	33.811.577,3	965.829,9	-	965.829,9	2,9	0,0	2,9	87	23	23	133	82,7	17,3
07.16	16. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan	2.705.170,0	10.671.485,4	7.966.315,4	-	7.966.315,4	294,5	0,0	294,5	30	0	4	34	88,2	11,8
07.17	17. Pengelolaan Resiko Bencana	6.861.180,0	176.625,0	(6.684.555,0)	-	(6.684.555,0)	-97,4	0,0	-97,4	11	4	1	16	93,8	6,3
07.18	18. Sinergi Pembangunan Perdesaan	23.279.397,4	22.963.466,9	(315.930,5)	-	(315.930,5)	-1,4	0,0	-1,4	46	19	18	83	78,3	21,7
08.	Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana	88.946.628,8	103.120.081,1	14.173.452,3	-	14.173.452,3	15,9	0,0	15,9	137	30	47	214	78,0	22,0
08.19	19. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	20.975.180,0	17.135.606,5	(3.839.573,5)	-	(3.839.573,5)	-18,3	0,0	-18,3	42	0	1	43	97,7	2,3
08.20	20. Penguatan Konektivitas Nasional	51.729.423,8	69.104.413,5	17.374.989,7	-	17.374.989,7	33,6	0,0	33,6	58	30	46	134	65,7	34,3
08.21	21. Peningkatan ketahanan Air	16.242.025,0	16.880.061,1	638.036,1	-	638.036,1	3,9	0,0	3,9	37	0	0	37	100,0	0,0
09.	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	58.451.049,7	78.177.611,4	19.736.061,7	(9.500,0)	19.726.561,7	33,8	0,0	33,7	384	118	132	634	79,2	20,8
09.22	22. Perkuatan Ketahanan Pangan	41.827.894,6	60.313.101,8	18.494.207,2	(9.000,0)	18.485.207,2	44,2	0,0	44,2	249	47	30	326	90,8	9,2
09.23	23. Peningkatan Ketahanan Energi	3.081.794,3	2.940.695,7	(141.098,6)	-	(141.098,6)	-4,6	0,0	-4,6	19	11	7	37	81,1	18,9
09.24	24. Percepatan Pembangunan Kelautan	9.485.540,0	8.821.655,3	(663.884,7)	-	(663.884,7)	-7,0	0,0	-7,0	44	14	6	64	90,6	9,4
09.25	25. Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan Hidup	4.055.820,8	6.102.158,6	2.046.837,8	(500,0)	2.046.337,8	50,5	0,0	50,5	72	46	89	207	57,0	43,0
	TOTAL	416.227.952,7	460.689.749,9	44.749.907,9	(288.110,7)	44.461.797,2	10,8	(0,1)	10,7	1.298	451	368	2.117	82,6	17,4

Keterangan:

L = IKK Terpetakan secara LANGSUNG dalam RKA-KL

TL = IKK Terpetakan secara TIDAK LANGSUNG dalam RKA-KL

1.1.5. INDIKATOR KINERJA

% kesesuaian RKP Provinsi 2015 dengan RKP 2015

Capaian Kinerja 70 %
(target 50 % dan Realisasi 35%)

Sebagai bagian dari proses penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rangkaian Musrenbangnas dilaksanakan dalam rangka untuk membahas dan menyempurnakan rancangan awal dokumen perencanaan melalui sinkronisasi rencana kerja kementerian/lembaga di pusat dengan usulan pendanaan dan kegiatan dari daerah.

Musyawaharah Perencanaan Pembangunan Tingkat Nasional 2014



Sumber: Biro Humas Bappenas

Pengukuran pencapaian kesesuaian diukur dengan menilai “keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dalam RKP Provinsi 2014 dengan tujuan, sasaran, dan prioritas RKP 2014”, yang merupakan salah satu kriteria penilaian Anugerah Pangripta Nusantara; dan “persentase daerah kab/kota yang memanfaatkan *e-Musrenbang*”, yang merupakan media dalam upaya meningkatkan efektivitas dan sinergi proses perencanaan *bottom-up* dan *top-down* sehingga menghasilkan perencanaan yang berkualitas.

Dalam keseluruhan rangkaian penilaian Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2014, penilaian indikator tersebut merupakan bagian dari penilaian tahap I, yaitu penilaian terhadap Dokumen Perencanaan RKP Provinsi Tahun 2014, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 6
Tahapan Penilaian Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2014



Sumber: Pedoman Penilaian dan Pemberian Anugerah Pangripta Nusantara Penilaian Provinsi Tahun 2014

Penganugerahan Pangripta Nusantara Tahun 2014



Sumber: Biro Humas Bappenas

Penilaian tahap I, yaitu penilaian terhadap dokumen RKPDP Provinsi Tahun 2014 memiliki (empat) parameter, yaitu: (1) keterkaitan, (2) konsistensi, (3) kelengkapan dan kedalaman, serta (4) keterukuran. Dalam rangka mengukur kesesuaian RKPDP Provinsi 2014 dan RKP 2014, maka digunakan pendekatan menggunakan hasil penilaian pada parameter 'keterkaitan', khususnya pada indikator penilaian "keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dalam RKPDP Provinsi 2014 dengan tujuan, sasaran, dan prioritas RKP", sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 12
Penilaian Parameter Keterkaitan dalam Anugerah Pangripta Nusantara 2014

Parameter	Indikator	Skala Penilaian		Penjelasan Skala
Keterkaitan	Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPDP Provinsi 2014 yang terkait dengan: visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD	4	Sangat jelas	RKPDP Provinsi 2014 menyebutkan dan menjabarkan visi, misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD secara lengkap dan runtut dalam bentuk matrik
		3	Jelas	RKPDP Provinsi 2014 menyebutkan visi, misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD, tapi kurang lengkap dan kurang runtut
		1	Kurang jelas	RKPDP Provinsi 2014 menyebutkan visi, misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD, tapi tidak lengkap dan tidak jelas
		0	Tidak jelas	RKPDP Provinsi 2014 tidak berpedoman pada RPJMD
	Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPDP Provinsi 2014 yang terkait dengan tujuan, sasaran, dan prioritas RKP	4	Sangat jelas	RKPDP Provinsi 2014 menyebutkan dan menjabarkan tujuan, sasaran, dan prioritas RKP 2014 secara lengkap dan runtut dalam bentuk matrik
		3	Jelas	RKPDP Provinsi 2014 menyebutkan dan menjabarkan tujuan, sasaran, dan prioritas RKP 2014, tapi kurang lengkap dan kurang runtut
		1	Kurang jelas	RKPDP Provinsi 2014 menyebutkan tujuan, sasaran, dan prioritas RKP 2014, tapi tidak lengkap dan tidak jelas
		0	Tidak jelas	RKPDP Provinsi 2014 tidak berpedoman pada RKP 2014

Sumber: Pedoman Penilaian dan Pemberian Anugerah Pangripta Nusantara Penilaian Provinsi Tahun 2014

Dari hasil penilaian terhadap 33 dokumen RKPDP Provinsi Tahun 2014, keterkaitan dokumen RKPDP Provinsi dan RKP dinyatakan tercapai apabila setiap dokumen RKPDP memiliki nilai 3 (tiga) atau 4 (empat) dalam skala penilaian. Di samping itu, dalam penyusunan RKPDP yang juga melibatkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, maka dikembangkan aplikasi *e-Musrenbang* yang merupakan aplikasi yang berbasis *website* yang dapat menghasilkan materi usulan pendanaan dan kegiatan yang dapat digunakan dalam Musrenbang Provinsi (hasil usulan Kabupaten/Kota) serta Musrenbang Nasional (hasil usulan Provinsi) sebagai masukan dalam Penyusunan RKP. Hasilnya kemudian difinalisasi lebih lanjut sebagai pedoman dalam penyusunan RKA K/L yang merupakan mata rantai dalam proses penyusunan APBN.

Realisasi pencapaian indikator kinerja kesesuaian RKPD Tahun 2014 Provinsi dan RKP 2014 melalui penilaian kegiatan Pangripta Nusantara Tahun 2014 adalah 18 dari 33 Provinsi atau 55 persen. Sedangkan pencapaian melalui kegiatan UKPPD online adalah 455 dari 531 kab/kota atau 85,7%. Kedua pencapaian tersebut diakumulasikan sehingga pencapaian indikator kinerja kesesuaian RKPD Tahun 2014 Provinsi dan RKP 2014 adalah sebesar 70%. Pencapaian tersebut cukup baik karena telah mencapai target yang telah ditetapkan. Rincian jumlah Kab/Kota yang memanfaatkan *e-Musrenbang* di setiap pulau dapat dilihat pada Tabel 13 di bawah ini.

Tabel 13
Persentase Kabupaten/Kota yang menggunakan Aplikasi *e-Musrenbang*

Pulau	Jumlah Kab/Kota Dalam Renja	Jumlah Kab/Kota yang menggunakan <i>e-musrenbang</i>	Persentase
Sumatera	167	131	78,44
Jawa	119	96	80,67
Kalimantan	58	56	96,55
Sulawesi	80	74	92,50
Nusra Bali	42	39	92,86
Maluku Papua	65	59	90,77
TOTAL	531	455	85,69

Sumber: Kedepuyan Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, 2014



Kementerian PPN/Bappenas mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan SDM aparatur perencana dan institusi perencanaan baik di tingkat pusat maupun daerah, melalui pengembangan sumber daya manusia aparatur perencana (*Capacity Building Program*). Indikator kinerja tahun 2014 yang telah ditetapkan yaitu “Rasio Kecukupan SDM Perencana yang berkualitas di K/L/P” diukur dengan membandingkan antara kebutuhan perencana ideal dan berkualitas dengan kondisi perencana yang ada saat ini. Indikator ini merupakan hasil penajaman indikator kinerja tahun-tahun sebelumnya, yaitu fasilitasi dan pembinaan SDM aparatur perencana pusat dan daerah.

Berdasarkan hasil survei tahun 2014 yang dilakukan di beberapa Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota diperoleh gambaran kondisi kualitas perencana di seluruh Indonesia berdasarkan jenjang pendidikan gelar dan keikutsertaan mereka dalam diklat non-gelar sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 14 dan Tabel 15. Survei bertujuan mengumpulkan data jumlah perencana di lembaga/unit kerja perencanaan yang melakukan tugas pokok dan fungsi perencanaan.

Dari hasil survei tersebut telah ditetapkan target kinerja atas Rasio Kecukupan (kesenjangan) jumlah SDM perencana berkualitas tahun 2014 sebesar 1,2% (berdasarkan kebutuhan perencana berkualitas sebesar 6% selama 5 tahun). Rasio tersebut dihitung dari rata-rata penjumlahan kebutuhan Diklat Gelar sebesar 4% dan diklat non-gelar sebesar 8% atau rata-rata 1,2% per tahun (setara dengan gelar 725 orang dan non- gelar 1.751 orang).

Pengembangan SDM aparatur perencana pusat dan daerah tahun 2010-2014 untuk pendidikan gelar jenjang S2 dan S3 serta pendidikan dan pelatihan (diklat) non-gelar di bidang perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui Program beasiswa SPIRIT (*Scholarship Program For Strengthening Reform Institutions*) periode 2010-2017 dan PHRDP III (*Human Resources Development Program*) periode 2006-2015 dan PHRD IV periode 2014-2020.

Tabel 14
Kebutuhan SDM Perencana Berkualitas Tingkat Nasional Berdasarkan Diklat Gelar

INSTANSI/ PEMERINTAH	Σ PERENCANA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN				Σ KEBUTUHAN PERENCANA YANG HARUS DIKLAT GELAR		
	S1	S2	S3	JUMLAH	S2*	S3**	JUMLAH
PUSAT (54/KL)	5.496	1.237	137	6.870	4.122	62	4.184
PROVINSI (34)	6.528	1.469	163	8.160	4.896	73	4.969
KAB/KOTA (514)	98.688	22.205	2.467	123.360	74.016	1.110	75.126
JUMLAH TOTAL	110.712	24.910	2.768	138.390	83.034	1.246	84.280

* Asumsi 75% dari jumlah perencana lulusan S1 yang harus melanjutkan studi S2

**Asumsi 5% dari jumlah perencana yang lulus S2 yang harus melanjutkan studi S3

Tabel 15
Kebutuhan SDM Perencana Berkualitas Tingkat Nasional Berdasarkan Diklat Non Gelar

INSTANSI/ PEMERINTAH	Σ PERENCANA	Σ PERENCANA YANG PERNAH IKUT DIKLAT NON GELAR*	Σ PERENCANA YANG BELUM IKUT DIKLAT NON GELAR	Σ KEBUTUHAN PERENCANA YANG HARUS DIKLAT NON GELAR**
PUSAT (54/KL)	6.870	3.529	3.341	2.673
PROVINSI (34)	8.160	2.134	6.026	4.821
KAB/KOTA (514)	123.360	6.277	117.083	93.666
JUMLAH	138.390	11.940	126.450	101.160

* Perencana yang pernah ikut Diklat perencanaan non-Gelar Bappenas sejak 2006-2014

**Asumsi kebutuhan perencana Diklat non-Gelar adalah 80% dari jumlah perencana yang belum ikut Diklat non-Gelar

Jumlah kebutuhan perencana dari Diklat Gelar dan non-Gelar dihitung menggunakan asumsi persentase dari jumlah perencana yang telah mengikuti Diklat Gelar dan non-Gelar. Jumlah kebutuhan perencana Diklat Gelar S2 (harus melanjutkan studi S2) adalah 83.034 orang (75% dari jumlah perencana yang berpendidikan S1), Diklat Gelar S3 adalah 1.246 orang (5% dari jumlah perencana yang berpendidikan S2) dan Diklat non-Gelar adalah 101.160 orang (80% dari jumlah perencana yang sudah mengikuti Diklat non- Gelar).

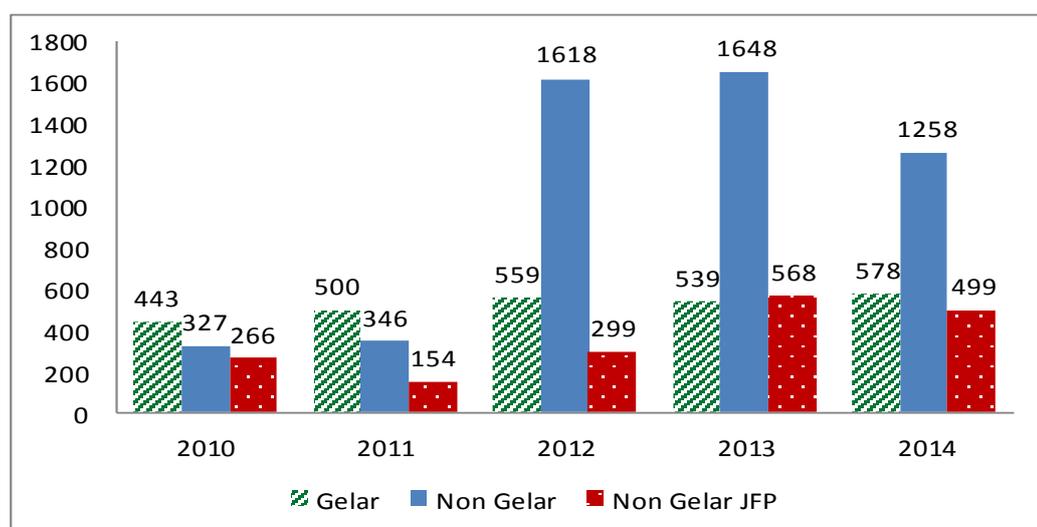
Penggunaan asumsi kebutuhan diklat S2, S3, dan non-gelar sebesar 75%, 5% dan 80% didasarkan bahwa untuk menyusun dokumen perencanaan, sebagian besar bersifat kegiatan yang memerlukan perumusan dan identifikasi masalah, analisis dan perumusan kebijakan yang dapat dilakukan SDM perencana setara dengan pendidikan S2, sedangkan kegiatan lainnya yang bersifat pengambilan dan evaluasi kebijakan hanya memerlukan porsi kecil yang dapat dilakukan perencana berpendidikan S3. Sedangkan diklat non-Gelar, sebagian besar kegiatan adalah dalam menyusun dokumen perencanaan yang memerlukan pengetahuan dan ketrampilan terkini di bidang perencanaan, tapi sebagian kecil terkait dengan pengetahuan dan ketrampilan teknis atau sektoral (non perencanaan).

Dari kebutuhan Diklat Gelar, rasio kecukupan jumlah perencana seluruh Indonesia baru tersedia 25% (yang sudah S2 dan S3) atau kurang 75% (84.280 orang perencana). Sedangkan untuk Diklat non-Gelar, rasio kecukupan jumlah perencana baru tersedia 20% atau masih memerlukan 80% (101.160 orang) dari jumlah keseluruhan kebutuhan perencana.

Melalui program pengembangan sumber daya manusia aparatur perencana, maka dari target indikator kinerja 1,2 % tercapai realisasi sebesar 1,1 % (capaian kinerja 91,7%), yaitu pada tahun 2014 telah meluluskan 604 orang (0,7%) Diklat Gelar dan Diklat non-Gelar 1.757 orang (1,7%) di bidang perencanaan pembangunan. Capaian rasio kecukupan SDM perencana yang berkualitas di K/L/P yang hanya mencapai 91,7% tersebut disebabkan adanya sebagian karyasiswa (gelar) tidak dapat lulus tepat waktu dengan alasan kesehatan, keluarga, psikologis dan non akademik lainnya. Sedangkan untuk Diklat non-Gelar disebabkan tidak diijinkannya sebagian calon peserta Diklat non-Gelar oleh atasan pada saat Diklat akan dilaksanakan dan khusus untuk JFP ada 6 orang yang tidak lulus ujian kompetensi.

Perbandingan realisasi pelaksanaan pendidikan gelar dan non-gelar tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7
Jumlah Perencana Yang Lulus Diklat Gelar Dan Non Gelar 2010 - 2014



Secara umum, jumlah peserta Diklat Gelar dan non-Gelar substantif meningkat terus sejak 2010 sampai 2014, kecuali program gelar menurun di tahun 2013 dan program non- gelar menurun pada tahun 2014). Penurunan jumlah gelar ini disebabkan telah berakhirnya program S2 linkage sebagai akhir program PHRD-III pada tahun 2013. Sedangkan penurunan non- gelar disebabkan karena terjadinya penurunan alokasi anggaran yang berasal dari PHRD-III.



Indikator Kinerja “% Sasaran Prioritas Nasional yang telah sesuai dengan rencana” merupakan kinerja yang mendukung sasaran strategis kedua yaitu terlaksananya program-program pembangunan sesuai rencana ditetapkan. Pengukuran pencapaian kinerja atas indikator sasaran prioritas nasional yang telah sesuai dengan rencana adalah membandingkan antara total sasaran prioritas RPJMN yang tercapai dengan total sasaran prioritas di RPJMN. Untuk mengetahui sasaran prioritas RPJMN yang tercapai dilakukan melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMN 2010-2014.

Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan suatu rencana merupakan tahapan dari siklus perencanaan. Hal ini diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Evaluasi tersebut merupakan salah satu langkah penting dalam manajemen pembangunan. Pelaksanaan evaluasi terhadap 4 (empat) tahun pelaksanaan RPJMN 2010-2014 menjadi sangat penting karena hasilnya akan dimanfaatkan sebagai salah satu bahan dalam penyusunan RT-RPJMN 2015-2019. Evaluasi dilakukan terhadap pencapaian 14 (empat belas) Prioritas Nasional merupakan upaya pencapaian indikator kinerja Sasaran Prioritas Nasional yang telah sesuai dengan rencana pembangunan nasional. Dalam melakukan evaluasi tersebut, tingkat capaian ditunjukkan dengan 3 (tiga) warna notifikasi yaitu warna hijau (sudah tercapai/*on track/on trend*), kuning (perlu kerja keras), dan merah (sangat sulit tercapai).

Adapun pencapaian kinerja atas indikator sasaran prioritas nasional yang telah sesuai dengan rencana adalah membandingkan antara total sasaran prioritas RPJMN yang tercapai (sesuai warna hijau dan kuning) dengan total sasaran prioritas di RPJMN (warna hijau, kuning dan merah). Dari 14 (empat belas) Prioritas Nasional tersebut, pada tahun 2014 terdapat 136 indikator yang dievaluasi seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 16
Capaian Indikator Kinerja Dari Prioritas Nasional Tahun 2014

NO	PRIORITAS NASIONAL	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA MENURUT KATEGORI CAPAIAN			
		JUMLAH INDIKATOR	SANGAT SULIT DICAPAI	PERLU KERJA KERAS	SUDAH TERCAPAI/ ON TRACK
1	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	10	4	4	2
2	Pendidikan	6	0	0	6
3	Kesehatan	12	6	3	3
4	Penanggulangan Kemiskinan	5	0	1	4
5	Ketahanan Pangan	9	1	6	2
6	Infrastruktur	14	2	3	9
7	Iklim Investasi dan Iklim Usaha	9	1	3	5
8	Energi	6	2	1	3
9	LH dan Pengelolaan Bencana	12	0	3	9
10	Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik	4	0	0	4
11	Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi	7	0	0	7
12	Politik, Hukum dan Keamanan	12	2	0	10
13	Perekonomian	15	0	6	9
14	Kesejahteraan Rakyat	15	0	1	14
TOTAL		136	18	31	87
PRESENTASE		100%	13,24%	22,79%	63,97%

Sumber: Laporan Kinerja Kedeputusan Evaluasi Kinerja Pembangunan Tahun 2014

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 136 indikator tersebut menunjukkan bahwa 118 indikator telah sesuai dengan rencana (86,77%), yang terdiri dari 87 indikator berwarna hijau (sudah tercapai) dan 31 indikator lainnya mendapat warna kuning (perlu kerja keras). Adapun sebanyak 18 indikator atau 13,24% adalah indikator yang mendapat warna merah, yang dikategorikan belum sesuai dengan rencana dan diprediksi akan sangat sulit tercapai di tahun 2014. Dengan demikian, pencapaian kinerja tercapai 96,4% (realisasi 86,77% dari target sebesar 90%).

Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013, capaian kinerja tahun 2014 adalah sama yaitu sebesar 86,77 %. Namun demikian, terjadi pergeseran yaitu dari 83 indikator kinerja menjadi 87 indikator kinerja (dari 61,03 % menjadi 63,97 %). Pergeseran tersebut terdiri dari status capaian 6 indikator dari perlu kerja keras (warna kuning) menjadi sudah tercapai/*on track* (warna hijau) dan pergeseran status 2 indikator yang pada tahun lalu sudah tercapai/*on track* (warna hijau) menjadi sangat sulit dicapai (warna kuning). Penurunan status capaian terjadi pada Prioritas nasional Energi. Permasalahan utama dalam pembangunan energi antara lain pada laju produksi minyak bumi yang terus mengalami penurunan, disamping adanya kehilangan potensi produksi. Dari sisi regulasi minyak dan gas bumi perlu segera revisi Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi yang sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan penataan kelembagaan institusi hulu dan hilir, pembentukan petroleum fund, harmonisasi regulasi dan peran pemerintah daerah.



Pengukuran kinerja “pendapat *stakeholders* terhadap proses penyusunan RKP 2015” dilakukan melalui pelaksanaan survei dengan melibatkan pemerintah pusat (K/L) maupun pemerintah daerah (Pemda). Tujuan dari pengukuran kinerja ini adalah untuk menilai tingkat kepuasan *stakeholders* atas proses penyusunan RKP 2015.

Secara umum keseluruhan rangkaian tahapan pelaksanaan penyusunan RKP 2015 dinilai sangat baik dengan tingkat implementasi rata-rata 86,89%. Penilaian optimalitas proses penyusunan RKP 2015 lebih terinci dijabarkan pada Tabel 17 berikut.

Tabel 17
Tingkat Implementasi Proses Penyusunan RKP 2015

Tahapan Kegiatan	Tingkat Implementasi Kegiatan (%)	Nomor Urut (Tertinggi – Terendah)
Pra Rakorbangpus	Tidak Dinilai	-
Rakorbangpus	87,62	3
Musrenbangprov	88,81	1
PraMusrenbangnas	86,70	4
Musrenbangnas	83,83	5
Pasca Musrenbangnas	87,65	2
Rata-rata	86,89	

Sumber: Hasil Survei Kepuasan *Stakeholder* Terhadap Proses Penyusunan RKP 2015

Catatan: Nilai Tingkat Implementasi 60-70 “Cukup”; 70-80 “Baik”; dan >80 “Sangat Baik”

Optimalitas keseluruhan kegiatan diindikasikan oleh adanya keluaran dokumen RKP dengan kualitas sebagaimana diharapkan. Namun demikian terdapat beberapa aspek pada tahapan penyusunan RKP yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan mutu penyusunan RKP selanjutnya. Berdasarkan analisis pada masing-masing tahapan kegiatan, dapat diketahui bahwa responden menilai implementasi paling optimal adalah pada pelaksanaan Musrenbangprov, selanjutnya adalah kegiatan PascaMusrenbangnas, serta Rakorbangpus. Kegiatan yang dinilai terendah oleh responden

tingkat optimalitasnya dibandingkan tahapan lainnya adalah kegiatan Musrenbangnas.

Melalui survei yang telah dilakukan selama periode 2012-2014 menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan, walaupun beberapa tahapan kegiatan penyusunan RKP yang dinilai oleh responden berfluktuasi. Dinamika mutu pelaksanaan kegiatan RKP dari tahun ke tahun dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 18
Hasil Survei Proses Penyusunan RKP Tahun 2013-2015

Tahapan Kegiatan	RKP 2013	RKP 2014	RKP 2015
Pra Rakorbangpus ^{*)}	95,96	85,14	-
Rakorbangpus	54,17	85,71	87,62
Musrenbangprov	86,72	87,66	88,81
PraMusrenbangnas	93,80	82,14	86,70
Musrenbangnas	77,55	87,46	83,83
Pasca Musrenbangnas	83,33	85,71	87,65

Sumber: Hasil Survei Kepuasan *Stakeholder* Tahun 2012-2014 Terhadap Proses Penyusunan RKP 2013-2015

^{*)} Pada tahun 2014, tidak terdapat tahapan Pra Rakorbangpus.

Berdasarkan pemetaan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan Rakorbangpus, Musrenbangprov, PraMusrenbangnas, dan PascaMusrenbangnas dinilai “sangat baik” (>80) dan memberikan tingkat kepuasan kepada *stakeholders* walaupun perlu diperbaiki agar kinerjanya memenuhi/sesuai harapan *stakeholders*.



Pengukuran kinerja “Pendapat *stakeholders* tentang Proses Penyusunan RPJMN 2015-2019” dilakukan melalui pelaksanaan survei dengan melibatkan pemerintah pusat (K/L), Pemda (Bappeda), dan Unit Kerja Sektoral di Kementerian PPN/Bappenas. Tujuan dari survei ini adalah:

1. Mengidentifikasi persepsi para pemangku kepentingan terhadap tingkat kepuasan proses penyusunan RPJMN 2015-2019
2. Menguraikan mutu pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJMN 2015-2019
3. Merumuskan saran untuk memperbaiki atau meningkatkan penyelenggaraan penyusunan RPJMN 2015-2019 berdasarkan masukan atau penilaian para pemangku kepentingan perencanaan

Berdasarkan hasil survei, rangkaian tahapan pelaksanaan penyusunan RPJMN 2015-2019 dinilai “baik” dan sudah optimal. Secara keseluruhan proses dan tahapan penyusunan RPJMN 2015-2019 yang dinilai oleh responden (Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah/Bappeda, Bappenas) berjalan sesuai dengan agenda waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Proses dalam bentuk tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan sudah

mengikuti tata urutan sebagaimana yang telah ditetapkan, dan dipahami secara baik oleh responden. Dengan demikian dilihat dari manajemen waktu pelaksanaan, seluruh kegiatan telah sesuai dengan sistem perencanaan. Optimalitas keseluruhan kegiatan diindikasikan oleh adanya output yang sesuai untuk masing-masing tahapan, yang meliputi kegiatan: penyusunan Kajian Pendahuluan (*Background Study*), pelaksanaan evaluasi RPJMN 2010-2014, penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik, penyusunan rancangan awal RPJMN 2015-2019, penyusunan rancangan RPJMN 2015-2019, penyusunan rancangan akhir RPJMN 2015-2019, dan penetapan RPJMN 2015-2019.

Tabel 19
Mutu Tahapan Kegiatan Penyusunan RPJMN 2015-2019

Penilai	Tahapan Kegiatan	Mutu (%)	Rank
Bappenas			
	Penyusunan Kajian Pendahuluan (<i>Background Study</i>)	79,54	1
	Pelaksanaan Evaluasi RPJMN 2010-2014	75,40	2
	Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik (RT-RPJMN)	74,83	3
	Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir, Dan Penetapan RPJMN 2015-2019	74,21	4
	Pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Nasional (Musrenbang RPJMN)	73,32	5
	Rata-rata	75,46	Baik
Kementerian/Lembaga			
	Penyiapan Rancangan Renstra K/L	80,48	3
	Pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Nasional (Musrenbang RPJMN)	80,65	2
	Penyusunan Dan Penetapan Rancangan Akhir RPJMN 2015-2019	80,38	4
	Penyesuaian Renstra KL dengan RPJMN	82,61	1
	Rata-rata	83,05	Sangat Baik
Bappeda			
	Musrenbang Jangka Menengah Nasional (RPJMN)	78,83	2
	Penyusunan Dan Penetapan Rancangan Akhir RPJMN 2015-2019	81,40	1
	Penyesuaian RPJMD Dengan RPJMN	69,61	3
	Rata-rata	76,48	Baik

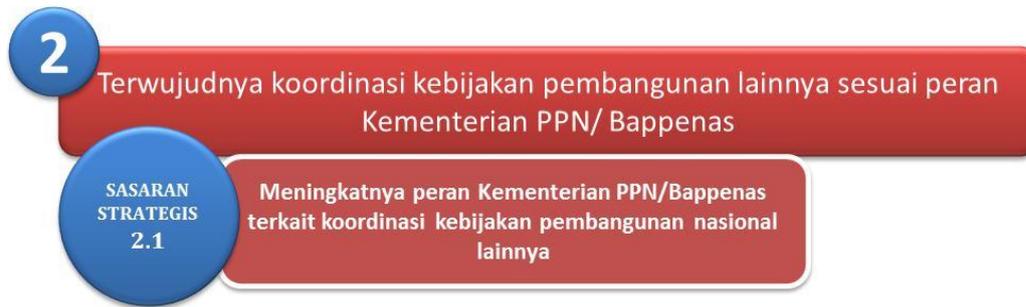
Sumber : Hasil survei kepuasan stakeholder pada proses penyusunan RPJMN 2015-2019

Catatan: Nilai Tingkat Implementasi 60-70 "Cukup"; 70-80 "Baik"; dan >80 "Sangat Baik"

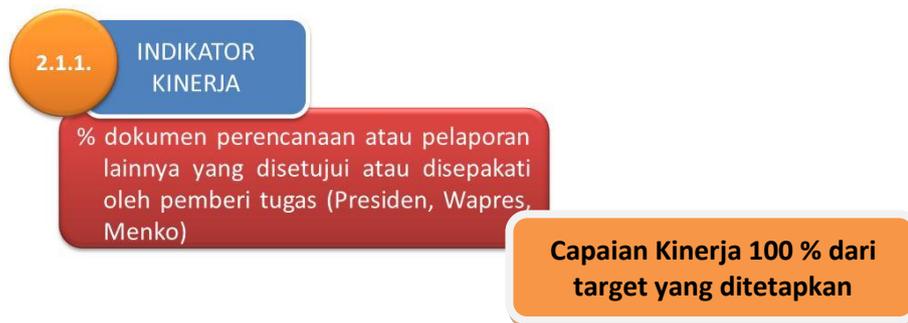
Tahapan kegiatan penyusunan RPJMN 2015-2019 dinilai dengan kategori baik sampai sangat baik oleh responden. Responden internal Bappenas memberikan penilaian 75,46% atas mutu pelaksanaan kegiatan, yang berarti secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan RPJMN dinilai baik. Demikian halnya Pemda dalam hal ini Bappeda memberikan penilaian 76,48% atas mutu pelaksanaan kegiatan, yang berarti secara keseluruhan pelaksanaan tahapan kegiatan RPJMN dinilai baik. Kementerian/Lembaga (K/L) memberikan penilaian 83,05% atas mutu pelaksanaan kegiatan, yang berarti secara keseluruhan pelaksanaan tahapan kegiatan RPJMN dinilai sangat baik, sebagaimana terdapat pada Tabel 19.

Hasil survei menyatakan pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Nasional menjadi prioritas untuk disempurnakan, melalui: 1) peningkatan kesempatan bagi K/L/Pemda untuk menyampaikan aspirasinya; 2) perbaikan mutu komunikasi persiapan dan pascaMusrenbangnas

(terutama terkait dengan Teknologi Informasi); dan 3) peningkatan efektifitas pelaksanaan Musrenbangnas.



Disamping pencapaian kinerja utama dalam menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas, Kementerian PPN/Bappenas juga melakukan tugas-tugas terkait dengan koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya dalam rangka efektivitas kerjasama pembangunan nasional maupun internasional. Pada tahun 2014, pencapaian tujuan tersebut diukur dengan 2 (dua) indikator, yaitu: 1) % dokumen perencanaan atau pelaporan lainnya yang disetujui atau disepakati oleh pemberi tugas (Presiden, Wapres, Menko); 2) % K/L/P yang telah menindaklanjuti program-program penugasan khusus. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya pencapaian tujuan diukur melalui “tingkat keberhasilan pelaksanaan koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya sesuai dengan perannya”.



Pencapaian indikator ini diukur melalui seberapa banyak dokumen perencanaan atau pelaporan lainnya yang disetujui atau disepakati oleh Presiden, Wapres, Menko yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas dibandingkan dengan total tugas-tugas lain yang diperintahkan dalam penyusunan dokumen tersebut.

Berdasarkan evaluasi atas pencapaian kinerja tahun 2014 terhadap “Tingkat Kesesuaian Dokumen Perencanaan atau Pelaporan Lainnya yang Disetujui atau Disepakati oleh Pemberi Tugas (Presiden, Wakil Presiden, Menteri Koordinator)” capaiannya adalah sebesar 100%. Capaian kinerja ini merupakan hasil kinerja seluruh ke deputian di Kementerian PPN/Bappenas yang hasilnya dapat diterima dan dipergunakan dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan yang telah ada. Dokumen atau pelaporan yang dihasilkan oleh masing-masing ke deputian dalam rangka mendukung capaian kinerja tersebut adalah sebagaimana terdapat pada berikut.

Tabel 20

Dokumen Perencanaan atau Pelaporan Lainnya yang dihasilkan oleh Kedeputian Tahun 2014

DOKUMEN PERENCANAAN ATAU PELAPORAN	
DEPUTI BIDANG SDM	
1.	Laporan capaian kinerja KIB I dan KIB II
2.	Penulisan bahan masukan pidato kenegaraan Presiden dan Lampid
3.	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi RAN-PG dan RAD-PG 2011-2015
4.	Koordinasi dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Prakarsa Strategis <i>MDGs Acceleration Framework</i> (MAF)
5.	Pelaksanaan koordinasi gerakan nasional percepatan perbaikan gizi dalam rangka Seribu Hari Kehidupan (Gerakan 1000 HPK)
6.	Koordinasi Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah RI-UNFPA Siklus Ke-8 (2011-2015) Pelaksanaan Tahun 2014
7.	Koordinasi Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah RI-UNICEF untuk CPAP 2010-2015 Tahun 2014
8.	Koordinasi Strategis Pengarusutamaan Gender
DEPUTI BIDANG POLHUKHANKAM	
1.	Penyusunan Buku Capaian KIB I dan KIB II
2.	Penyusunan Lampiran Pidato Presiden 2014,
3.	Penyusunan Konsep Kerangka Kelembagaan dalam perencanaan pembangunan
4.	Penyusunan Kerangka Regulasi dalam RPJMN 2015-2019
DEPUTI BIDANG KKUKM	
1.	Kajian Defini Kemiskinan
2.	Kegiatan <i>Quick Wins</i> MP3KI
3.	Pengembangan Sistem Informasi Terpadu (SIMPADU) Penanggulangan Kemiskinan
4.	Penyusunan Master Plan Pengembangan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM)
5.	Kegiatan <i>Global Pulse</i>
6.	Penyusunan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan
7.	Koordinasi Jejaring Lapangan Kerja Bagi Kaum Muda
DEPUTI BIDANG EKONOMI	
1.	Forum Masyarakat Statistik
2.	Kajian Pengembangan Model Ekonomi Makro
3.	Kajian Pengembangan Ekonomi Syariah dan pembinaan BUMN
4.	Koordinasi Strategis penyusunan kebijakan, perencanaan, pemantauan dan evaluasi DAK bidang sarana perdagangan
5.	Australia-Indonesia <i>Partnership For Pro-Poor Policy: The Knowledge Sector Initiative</i>
DEPUTI BIDANG SDA LH	
1.	<i>Global Green Growth Institute</i> (GGGI)
2.	Evaluasi Pelaksanaan Inpres 5 Tahun 2011 dan Efektivitas Program Peningkatan Produksi Beras Nasional
DEPUTI BIDANG SARANA PRASARANA	
1.	Percepatan Pemanfaatan /Pembangunan Waduk untuk PLTA
2.	Pembangunan Pesisir Terpadu Ibukota Negara
3.	Koordinasi Strategis/Sekretariat Tim Pengarah Nasional Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air atau <i>National Steering Committee Water Resources</i> (NSCWR)
4.	Koordinasi Tim Kerja Konektivitas Nasional
5.	Koordinasi Dekade Aksi Keselamatan Jalan
6.	Koordinasi Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan Transportasi Jalan
7.	Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)
8.	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIPIP)
9.	Perumahan Swadaya/Rumah Sangat Murah
10.	Penyediaan Air Minum
11.	Penyusunan buku capaian KIB I dan II
12.	Penyiapan bahan pidato kenegaraan Presiden
13.	Laporan pelaksanaan tugas Menteri PPN/Kepala Bappenas
14.	Penyusunan kerangka kelembagaan infrastruktur dalam perencanaan pembangunan nasional
15.	Kegiatan Sekretariat Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI)
16.	<i>The Project for PPP Network Enhancement</i>
17.	Kegiatan <i>Infrastructure Reform Sector Development Project</i> (IRSDP)
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTDA	
1.	Laporan Kegiatan BKPRN Semester I Tahun 2014
2.	Laporan Kegiatan BKPRN Semester II Tahun 2013
DEPUTI BIDANG EKP	
1.	Penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra Kementerian PPN/Bappenas
2.	Pencapaian Kinerja Pembangunan KIB I dan II
3.	Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Tahun 2014
4.	Laporan Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2013
5.	Laporan Pelaksanaan Tugas Menteri PPN/Kepala Bappenas Dalam Kabinet Indonesia Bersatu II 2009-2014
6.	Buku Saku Pembangunan Tahun 2004-2014.
7.	Kumpulan Ringkasan Kajian dan Evaluasi Sektor 2008-2013
8.	Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019

Sumber: Laporan Kinerja Seluruh Kedeputian Tahun 2014

2.1.2.

INDIKATOR
KINERJA

% K/L/P yang telah menindaklanjuti
program-program penugasan khusus

Capaian Kinerja 100 % dari
target yang ditetapkan

Untuk mengukur pencapaian indikator kinerja % K/L/P yang telah menindaklanjuti program-program penugasan khusus, dilakukan dengan melihat seberapa banyak tugas-tugas lain sebagai program penugasan khusus pemerintah/Presiden yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan total penugasan yang diperintahkan oleh Pemerintah/Presiden. Tujuan penugasan tersebut adalah untuk mendukung koordinasi dan kerjasama pembangunan baik secara nasional maupun internasional melalui suatu rencana aksi nasional maupun kerjasama pembangunan internasional.

Dari target yang telah ditetapkan telah tercapai pelaksanaan seluruh penugasan yang diberikan oleh Pemerintah/Presiden sebesar 100 %. Adapun program penugasan khusus yang ditindaklanjuti oleh Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2014 antara lain:

1. Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GK)

Sebagai wujud komitmen penurunan emisi GRK sebesar 26% pada tahun 2020 dari tingkat *Business as Usual* (BAU) dengan usaha sendiri, dan mencapai 41% apabila mendapat dukungan internasional (pidato Presiden RI dalam pertemuan G-20 di Pittsburgh, Amerika Serikat, 25 September 2009) telah disusun Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011. RAN-GRK tersebut bertujuan untuk memberikan kerangka kebijakan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta menjadi acuan bagi pelaku usaha (swasta), masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan kegiatan penurunan emisi GRK dalam jangka waktu 2010-2020. Upaya penurunan emisi GRK, selain pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian/Lembaga di tingkat pusat, juga dilakukan pula di tingkat daerah agar daerah berkontribusi pula dalam pencapaian target nasional.

Dalam kaitan dengan perubahan iklim, telah dilakukan: (i) koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN-GRK, RAD-GRK, dan penyusunan RAN-API; dan (ii) Koordinasi strategis pengelolaan *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICTF). Selain itu juga telah disusun dokumen NAMAs yang merupakan kegiatan mitigasi yang akan mendapat dukungan dari masyarakat internasional. Dalam kaitan dengan ICCTF, pada tahun 2014 telah berhasil dilakukan: (i) Penyesuaian struktur ICCTF sesuai dengan PP 80/2014 tentang MAjelis Wali Amanah. ; (ii) ICCTF dikelola oleh direktur independen dan bukan ditangkap oleh PNS, staf Kementerian PPN/Bappenas; (iii) telah diselesaikan business plan, dan seluruh SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (iv) anggota Majelis Wali Amanah yang semula hanya beranggotakan pemerintah dan perwakilan donor, juga telah dilengkapi dengan anggota dari pengusaha, universitas dan LSM.

2. Rencana Aksi Pangan dan Gizi Tingkat Pusat dan Daerah Tahun 2014

Berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2010, Kementerian PPN/Bappenas ditugaskan untuk menyusun Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi, di samping itu diinstruksikan untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG). Kedua dokumen rencana aksi ini disusun secara terpadu, terkoordinasi, sinergis, dan komprehensif karena bersifat lintas sektor dan lintas program, sehingga dalam penyusunannya melibatkan berbagai pihak terkait baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Dasar pelaksanaan penyusunan rencana aksi, adalah dengan diterbitkan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 0154/M.PPN/05/2011 perihal Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG). Sepanjang tahun 2011 telah dilakukan pelaksanaan sosialisasi pedoman dan fasilitasi Penyusunan RAD-PG, baik melakukan kegiatan yang dikoordinasikan oleh Bappenas maupun atas inisiatif pemerintah daerah. Rangkaian kegiatan pada tahun 2012 meliputi peluncuran RAD-PG pada bulan Mei 2012 oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, penyusunan panduan monitoring dan evaluasi, sosialisasi mekanisme monitoring dan evaluasi, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi RAN-PG dan RAD-PG tahun 2012.

Saat ini 33 provinsi telah memiliki peraturan gubernur tentang RAD-PG, Provinsi Papua Barat merupakan provinsi terakhir yang tergabung melalui Peraturan Gubernur Papua Barat No. Pergub Nomor 14 tahun 2012. Untuk memantau pelaksanaan rencana aksi tersebut telah diterbitkan Surat Edaran Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang SDM dan Kebudayaan No. 5147/D.I/09/2013 tentang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RAD-PG di daerah. Tantangan yang dihadapi sinergitas perencanaan pusat dan daerah yang masih lemah, komitmen dari beberapa pimpinan institusi dalam pengalokasian anggaran yang belum optimal dan pelaporan capaian rencana aksi yang tidak tepat waktu. Sedangkan dampak positif dari rencana aksi adalah pemahaman tentang masalah gizi makin luas dikalangan non-kesehatan, adanya inisiatif dari beberapa kabupaten dan kota untuk menyusun rencana aksi dan meningkatnya kerjasama dalam bentuk kemitraan dengan dunia usaha.

3. Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Perpres No. 55 Tahun 2012)

Dasar hukum dari pelaksanaan koordinasi dengan kementerian lembaga tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 yang dimaksudkan sebagai acuan langkah-langkah strategis Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memastikan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Sebagai penjabaran dan pelaksanaan Stranas PPK, setiap tahun Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) yang ditetapkan dengan Instruksi Presiden (Inpres)

Sejak Tahun 2011, Bappenas mengkoordinasikan penyusunan Aksi PPK Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melalui Inpres No. 9 Tahun 2011 tentang Aksi PPK Tahun 2011, Inpres No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi PPK Tahun 2012, Inpres No. 1 Tahun 2013 tentang Aksi PPK Tahun 2013 dan Inpres No. 2 Tahun 2014 tentang Aksi PPK Tahun 2014. Berbagai capaian dari

Aksi PPK yang dilaksanakan setiap tahun oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah antara lain:

- 1) Meningkatkan keterbukaan informasi melalui pembentukan dan penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 2) Meminimalisir *human interaction* dan kemudahan dalam pelayanan publik dan perijinan melalui pemanfaatan teknologi informasi;
- 3) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas sektor pengadaan barang dan jasa melalui evaluasi *e-procurement*, publikasi Rencana Umum Pengadaan, pembentukan dan penguatan Unit Layanan Pengadaan, serta membentuk *whistleblowing system* khusus pengadaan;
- 4) Pembentukan, pelimpahan kewenangan, penyusunan SOP, dan penyediaan sarana pengaduan masyarakat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pemerintah Daerah;
- 5) Penguatan koordinasi antar aparat penegak hukum dalam penanganan perkara, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemilihan pejabat pada pos-pos strategis, serta meningkatkan profesionalitas aparat penegak hukum

Sebagai keberlanjutan pelaksanaan Stranas PPK, Bappenas telah mengintegrasikan kedalam RKP 2015 dan RPJMN 2015-2019 berdasarkan masukan dari para pemangku kepentingan. RKP 2015 menekankan bahwa salah satu arah dan strategi kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN adalah antara lain melalui Proses Pencegahan dan Penegakan Hukum yang terkoordinasi dan terintegrasi. Dalam melakukan upaya pencegahan dan penegakan hukum yang terintegrasi, diperlukan peningkatan koordinasi yang memadai antar aparat penegak hukum khususnya dalam berbagai upaya pencegahan yang integratif serta penanganan kasus-kasus yang mendapat perhatian masyarakat dan berpotensi menimbulkan kerugian yang besar kepada negara sehingga diharapkan upaya penegakan hukum dilakukan secara terpadu dan saling bersinergi.

4. Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gerakan 1000 HPK)

Koordinasi Pelaksanaan Perpres No. 42/2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gerakan 1000 HPK) secara umum bertujuan untuk mencapai sasaran utama yaitu Percepatan perbaikan gizi masyarakat prioritas pada seribu hari pertama kehidupan, yang diikuti dengan upaya mencapai 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu: (a) Meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan gizi masyarakat; (b) Meningkatkan kemampuan pengelolaan program gizi, khususnya koordinasi antar sektor untuk mempercepat sasaran perbaikan gizi dan; (c) Memperkuat implementasi konsep program gizi yang bersifat langsung dan tidak langsung. Untuk pelaksanaan peraturan ini, mitra kerja melakukan kegiatan antara lain mensosialisasikan gerakan ini daerah dan membangun kemitraan dengan pihak swasta untuk mendukung pembangunan gizi.

5. Koordinasi Strategis Pengarusutamaan Gender Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2014

Koordinasi Strategis Pengarusutamaan Gender bertujuan untuk mendukung fungsi Bappenas dalam melembagakan dan mempercepat penerapan pengarusutamaan gender pada seluruh

tahapan perencanaan dan penganggaran di kementerian/lembaga lainnya dan di internal Kementerian PPN/Bappenas (sebagai motor penggerak PPRG dan sebagai kementerian/lembaga yang harus mengimplementasikan PUG).

Melalui kegiatan ini telah dilaksanakan:

- 1) Penyusunan draft Pedoman Pelaksanaan PPRG di Kementerian PPN/Bappenas. Sebagai motor penggerak PPRG, pedoman ini berguna bagi para perencana di Bappenas sebagai panduan dalam menyusun rencana pembangunan nasional yang responsif gender (RPJMN dan RKP). Selanjutnya rencana pembangunan nasional yang responsif gender tersebut menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Restra KL/Renja KL yang responsif gender. Sedangkan sebagai kementerian/lembaga, pedoman ini berguna sebagai panduan bagi para pengambil keputusan dalam mengimplementasikan PUG di Bappenas untuk menciptakan Kementerian PPN/Bappenas yang responsif gender.
- 2) Identifikasi permasalahan/isu gender di Kementerian PPN/Bappenas. Permasalahan gender tersebut antara lain sarana prasarana kerja, kepegawaian, kebijakan/peraturan yang disusun, serta dokumen perencanaan pembangunan nasional yang disusun belum sepenuhnya responsif gender. Hal ini sebagai masukan dalam penyusunan Restra Bappenas 2015-2019 yang responsif gender.
- 3) Perumusan kebijakan dan kegiatan yang responsif gender di Bappenas untuk menyelesaikan isu gender yang ada secara bertahap. Contoh rencana tindak lanjut yang dibutuhkan adalah penambahan ruang menyusui yang memenuhi standar kualitas, penyediaan tempat penitipan anak/TPA, penyediaan sarana dan prasarana kerja yang responsif gender, integrasi materi PUG kedalam materi diklat JFP, pendampingan/fasilitasi direktorat teknis tentang PUG dan PPRG.
- 4) Diseminasi dan konsultasi tentang PUG dan percepatannya melalui PPRG melalui rapat koordinasi tim teknis yang anggota terdiri dari seluruh unit kerja eselon 2 di Kementerian PPN/Bappenas.



Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan merupakan tujuan untuk dapat memberikan gambaran keberhasilan atas pelaksanaan tugas-tugas pendukung pada tahun 2014 dengan sasaran strategis adalah terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan.

Untuk mengukur keberhasilan “Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas”, terdapat 3 (tiga) ukuran indikator kinerja yang akan menunjukkan keberhasilan pendukung kinerja, meliputi: 1) Nilai Reformasi Birokrasi; 2) Opini Dari BPK atas Laporan Keuangan; dan 3) Skor Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian PPN/Bappenas (AKIP). Adapun penjelasan hasil capaian pengukuran kinerja dari tujuan ketiga untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut.



Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan program Reformasi Birokrasi (RB) sejak tahun 2008 yang dituangkan dalam dokumen “Roadmap Reformasi Birokrasi” sesuai dengan kebijakan RB yang telah digariskan dalam PerMen PAN No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Dalam perkembangannya, pelaksanaan RB Nasional diarahkan untuk mengedepankan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas kebijakan dan penerapan *good governance* dengan melaksanakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, efektif dan efisien sesuai PerMen PAN RB 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu prioritas nasional dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II 2009-2014 yang tertuang dalam dokumen RPJMN 2010-2014 dan RPJPN 2005-2025 yang menyatakan “pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya”. Pelaksanaan program RB saat ini sudah memasuki tahun yang ke-6, sejak mulai digulirkan pertama kalinya pada tahun 2008. Pelaksanaan selama enam tahun terakhir, sudah membuahkan hasil dan memberikan dampak terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan.

Pada dasarnya RB adalah program atau upaya yang dilakukan secara terus menerus menuju pencapaian yang lebih baik melalui proses mereformasi diri menjadi birokrasi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dengan kata lain RB merupakan *never ending process*. Pada tahun 2013 penilaian atas capaian keberhasilan RB menggunakan pendekatan penilaian mandiri (*self assessment*) sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Secara Online. Sedangkan untuk tahun 2014 ini, terjadi perubahan metode dalam melakukan penilaian reformasi birokrasi sesuai dengan Peraturan Menteri PAN & RB No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Hasil penilaian mandiri pelaksanaan RB pada tahun 2014 adalah 89,26 (Tabel 21). Penilaian RB yang mencakup 2 (dua) komponen, yaitu komponen proses dengan nilai sebesar 53,75 dan komponen hasil dengan nilai sebesar 35,51.

Tabel 21
Hasil Penilaian PMPRB Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2014

KOMPONEN PROSES	NILAI	PERSENTASE
Manajemen Perubahan	4,71	94,29%
Penataan Peraturan Perundang-undangan	4,38	87,5%
Penataan & Penguatan Organisasi	6	100%
Penataan Tatalaksana	4,26	85,1%
Penataan Sistem Manajemen SDM	13,45	89,64%
Penguatan Akuntabilitas	5,8	96,67%
Penguatan Pengawasan	9,36	77,96%
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,8	96,67%
TOTAL PROSES	53,75	89,58%
KOMPONEN HASIL	NILAI	PERSENTASE
Kapasitas & Akuntabilitas Kinerja Organisasi	15,71	78,55%
Pemerintah yang Bersih & Bebas KKN	10	100%
Kualitas Pelayanan Publik	9,8	98%
TOTAL HASIL	35,51	88,78%
INDEKS RB KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS		89,26

Sumber: Hasil Penilaian PMPRB Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2014

Komponen proses penilaian RB terdiri dari 8 (delapan) area perubahan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

Komitmen Kementerian PPN/Bappenas dalam proses Reformasi Birokrasi terlihat dari penetapan Tim Manajemen Perubahan sejak tanggal 8 September 2012 melalui Surat Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. SK No. KEP.85/M.PPN/HK/9/2012, yang

terakhir diperbaharui dengan SK No. KEP.89/M.PPN/HK/11/2013, penyelenggaraan Pejabat Pembuat Komitmen *Award* untuk menciptakan budaya inovasi dan kompetensi, dan pelaksanaan kegiatan non formal seperti *coffee morning* untuk mendorong pegawai untuk berperan aktif.

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
Identifikasi dan analisis dilakukan pada Peraturan-peraturan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas sejak tahun 2001 dan secara intensif dilakukan pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas sejak Tahun 2008. Dalam kurun waktu 2008–2014, jumlah peraturan yang diidentifikasi dan dianalisa sebanyak 46 (empat puluh enam).
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan re-organisasi untuk memenuhi ketepatan tugas dan fungsi yang ditunjukkan dengan terbitnya Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara PPN/Bappenas. Selain itu, telah diterbitkan pula Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian PPN/Bappenas untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Penataan Tatalaksana
Sebagian besar unit kerja telah memiliki SOP yaitu sebanyak 317 SOP dan membangun *e-government* yang meliputi aplikasi *e-Office*, *e-Planning*, *e-budgeting*, *e-monev*, *e-proc*, *e-performance*. Bahkan untuk *e-planning*, aplikasi Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pemerintah Daerah (UKPPD) berbasis *website* telah dilaksanakan dari tahun 2011.
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Dilakukan melalui perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, proses penerimaan pegawai dilakukan secara *online* menggunakan metode *Computer Assisted Test (CAT)*, pengembangan pegawai dilakukan berdasarkan kompetensi, promosi jabatan dilakukan secara terbuka, penetapan kinerja individu, dan penegakan aturan perilaku pegawai. Selain itu, telah dibangun *Human Capital Development Program (HCDP)* sejak tahun 2012.
6. Penguatan Pengawasan
Inspektorat Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan perannya sebagai *early warning system* melalui *reviu*, *consulting*, *audit*. Dalam hal penguatan pengawasan, telah dilakukan penyusunan kode etik dan *Audit Charter*, pembangunan *Whistle Blowing System (WBS)*, serta penetapan zona integritas wilayah bebas korupsi.
7. Penguatan Akuntabilitas
Nilai laporan akuntabilitas kinerja mengalami peningkatan dari B+ menjadi A. Selain itu, telah dilakukan pengukuran capaian IKU organisasi.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Peningkatan kualitas pelayanan publik terlihat dari telah ditetapkannya standar pelayanan pada unit layanan publik dan telah tersedia layanan pengaduan, telah ditetapkannya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), adanya inovasi dari beberapa unit kerja untuk meningkatkan kualitas layanan, seperti membangun portal informasi yang dapat diakses

oleh pihak luar. Disamping itu, telah dilakukan survei indeks kepuasan atas pelayanan publik dengan hasil penilaian “baik”. Kementerian PPN/Bappenas juga berhasil meraih penghargaan peringkat X dari Komisi Informasi Pusat untuk kategori Badan Publik Pemerintahan dalam hal Keterbukaan Informasi Publik.

Komponen hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan dan diperoleh dari penilaian pihak eksternal, meliputi:

1. Kapasitas dan Akuntabilitas Organisasi
Hasil penilaian Kementerian PAN dan RB terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) tahun 2013 meningkat, dari B+ menjadi A (75,19 dari skala 1-100). Sedangkan hasil penilaian Pilar 1, 2, dan 3 oleh BPKP adalah 4,02 (dari skala 1-5).
2. Kualitas Pelayanan Publik
Dalam hal integritas layanan publik, tahun 2013 mendapat nilai 9,37 (skala 1-10). Sedangkan hasil survei eksternal tahun 2013 mendapat nilai 87,02 (skala 1-100).
3. Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari KKN
Pada tahun 2013, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) adalah 9,37 (skala 1-10). Selain itu, telah dilakukan survei kepada 7 (tujuh) Bappeda dan 4 (empat) K/L, dengan perolehan hasil persepsi adalah baik.

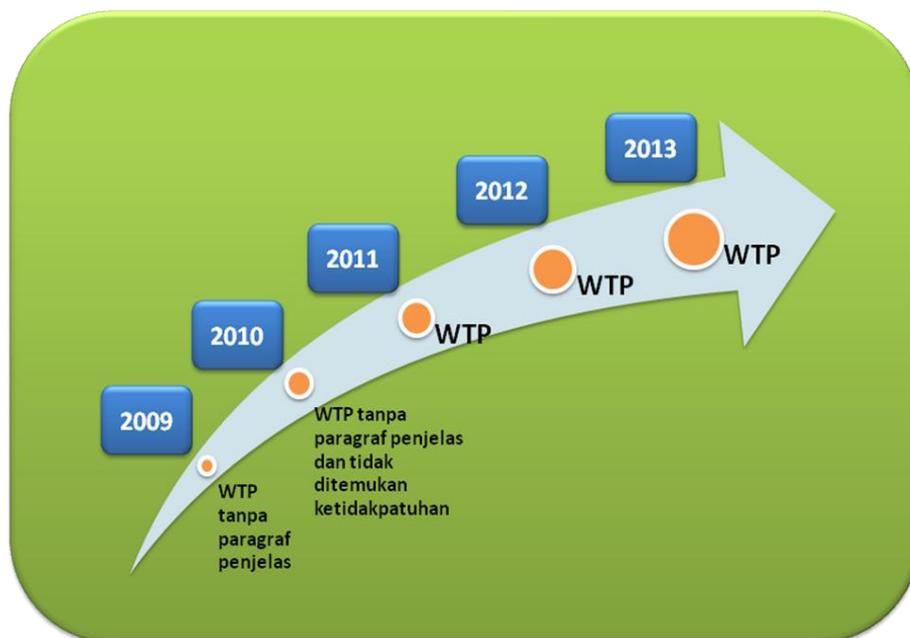
Perbedaan metode pengukuran untuk pelaksanaan reformasi birokrasi mengakibatkan perbedaan nilai yang dihasilkan. Pada tahun 2012, pengukur pencapaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas adalah dengan menggunakan Metode Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan perolehan nilai rata-rata 88,3. Dalam pelaksanaan RB tahun 2013 terjadi perubahan metode penilaian reformasi birokrasi dengan menggunakan pendekatan penilaian mandiri (*self assessment*) secara online diperoleh hasil rata-rata 87,11 dari masing-masing komponen, kemudian pada tahun 2014 nilainya meningkat menjadi 89,26.



Salah satu ukuran keberhasilan indikator lainnya dalam pencapaian peningkatan kapasitas kelembagaan adalah adanya opini dari BPK atas Laporan Keuangan. Untuk mengukur pencapaian opini BPK atas Laporan Keuangan adalah melalui pemeriksaan oleh Auditor eksternal, yaitu oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) secara rutin setiap tahun dengan menggunakan metode penilaian yang ditetapkan BPK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengukuran dalam Metode BPK tersebut menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan audit keuangan dan audit kinerja.

Pada tahun 2012 Kementerian PPN/Bappenas mengelola dana dekonsentrasi pada 33 provinsi di seluruh Indonesia sehingga Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012 mencakup pertanggungjawaban keuangan pada 35 satuan kerja (2 satker pusat dan 33 satker dana dekonsentrasi). Dari hasil penilaian BPK tersebut telah dihasilkan penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap laporan keuangan Kementerian PPN/Bappenas tahun 2014 untuk tahun periksa tahun 2013. Prestasi ini menjadikan Kementerian PPN/Bappenas sebagai Kementerian/Lembaga yang meraih opini WTP selama 6 (enam) tahun berturut-turut (Laporan Keuangan tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013), sebagaimana terlihat pada Gambar 8 berikut.

Gambar 8
Opini BPK Atas Laporan Keuangan



Hal ini menunjukkan bahwa terdapat dua hal penting atas dampak hasil opini tersebut, yaitu: pertama, opini WTP dapat menggambarkan akuntabilitas institusi baik dalam pengelolaan keuangan maupun kinerja sehingga akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan Kementerian PPN/Bappenas dapat terjaga. Kedua, opini WTP merupakan wujud tercapainya salah satu kontrak kinerja yang sudah ditandatangani Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Presiden. Prestasi opini tertinggi ini dicapai melalui kerja keras dan upaya perbaikan serta koordinasi dan kerjasama seluruh unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas, khususnya unit kerja Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas sebagai koordinator penyusunan laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas.

Disamping itu, untuk menjaga kualitas (*quality assurance*) penyusunan laporan keuangan juga dilakukan reuiu secara berkala (Semester dan Tahunan) oleh Inspektorat atas penyiapan Laporan Keuangan serta pendampingan selama proses audit dalam mendorong rencana aksi penyelesaian rekomendasi pemeriksaan (salah satunya penyelesaian temuan terkait pencatatan aset) sebagai pelaksanaan kegiatan Koordinasi Strategis Rencana Aksi Mempertahankan Opini Laporan keuangan.

Pencapaian opini WTP juga merupakan isu yang sangat penting karena memberikan gambaran tingkat kewajaran dari akuntabilitas pengelolaan dana publik yang terwujud pada suatu laporan keuangan. Tidak ada yang dapat menjamin bahwa opini WTP dari BPK dapat terus dicapai dan dipertahankan, tanpa adanya upaya yang sungguh-sungguh dan nyata untuk terus melakukan perbaikan proses manajemen dan peningkatan mutu laporan keuangan serta menindaklanjuti temuan BPK atas kelemahan-kelemahan yang ada. Pada tahun-tahun tercapainya opini WTP atas laporan keuangan, telah dilaksanakan berbagai aktivitas untuk mendukung upaya mempertahankan opini WTP yang secara terus menerus dan berlanjut.



Sebagai salah ukuran tentang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi berkelanjutan untuk memenuhi Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi AKIP bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pada tahun 2014, kualitas evaluasi AKIP ditingkatkan melalui penerapan *e-performance* yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memantau secara berkala perkembangan kinerja Kementerian PPN/Bappenas. Melalui *Dashboard* yang disusun, pimpinan semakin mudah untuk memberikan arahan dalam rangka meningkatkan kinerja. Disamping itu, dengan menggunakan sistem elektronik tersebut, data-data hasil pencapaian kinerja akan semakin mudah dibandingkan pada masa mendatang.

Pada periode 2010-2014 Evaluasi AKIP telah menghasilkan berbagai umpan balik. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut. Pelaksanaan evaluasi kinerja organisasi menghasilkan pertimbangan untuk perubahan struktur organisasi akibat adanya perubahan dinamika lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Berbagai forum pembelajaran oleh masing-masing unit Kedeputian telah dilakukan secara berkesinambungan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang utuh atas capaian akuntabilitas kinerja seluruh unit kerja di Kedeputian, Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas, dan Inspektorat Utama. Pembahasan akhir dilakukan oleh pimpinan tertinggi untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan setiap UKE I sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Inspektorat sebagai unit pengawas melakukan pengawasan kinerja dengan diantaranya melalui reviu LAKIP dan evaluasi terhadap capaian kinerja. Ketentuan pelaksanaan Evaluasi dituangkan dalam Ketetapan Inspektorat Utama No. 13/Juklak/IU/2013 tentang Pedoman Evaluasi LAKIP UKE I. Pada tahun 2014 evaluasi dilaksanakan terhadap terhadap seluruh UKE-I yaitu 11 (sebelas) UKE I.

Proses evaluasi telah dilakukan lebih komprehensif dibandingkan dengan evaluasi pada tahun 2013, yang melibatkan berbagai tingkatan, dimulai dari tingkat *Person in Charge* (PIC), Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon I, hingga Menteri PPN/Kepala Bappenas. Tahapan Evaluasi AKIP dilaksanakan secara berjenjang sampai dengan ke tingkat Pimpinan Lembaga (Menteri PPN/Bappenas). Penilaian terhadap hasil capaian kinerja UKE I menunjukkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja telah disusun dengan baik.

Hasil nyata dari pelaksanaan evaluasi AKIP oleh seluruh UKE I adalah peningkatan nilai evaluasi AKIP dari Kementerian PAN dan RB. Pada tahun 2013, Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan nilai 75,19 dengan predikat A. Dalam periode 2010-2012, nilai akuntabilitas kinerja dari tahun ke tahun terus meningkat, yaitu 65,33 tahun 2010, 65,44 tahun 2011, dan menjadi 72,07 tahun 2012.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 1.055,55 miliar dengan realisasi anggaran Rp. 899,95 miliar atau sekitar 85,3%. Anggaran Kementerian PPN/Bappenas terbagi ke dalam 4 (empat) Program yaitu: 1) Program Perencanaan Pembangunan Nasional, 2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas, dan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas. Anggaran per program dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Pada tahun 2014 juga terjadi penghematan anggaran sebesar Rp. 46,5 miliar yang diinstruksikan melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. Dengan adanya penghematan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas tetap dapat mempertahankan kualitas capaian kerjanya secara efisien di masing-masing program dengan cara:

- mengurangi daerah kunjungan dan sekaligus membatasi jumlah peserta/partisipan dalam kegiatan, antara lain: (i) menjaring aspirasi Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat dan sebagainya dalam rangka penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019; (ii) monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan nasional, dan (iii) Sosialisasi Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
- efisiensi terhadap proses pengadaan barang dan jasa, dan
- menunda pengadaan kendaraan dinas.

Tabel 22
Realisasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2014

(Rp. Miliar)

PROGRAM	PAGU ANGGARAN			REALISASI ANGGARAN		
	RM	PHLN	TOTAL	RM	PHLN	TOTAL
Perencanaan Pembangunan Nasional	187,96	246,29	434,25	163,98 (87,2%)	211,07 (85,7%)	375,04 (86,4)
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	307,98	276,02	584,00	249,47 (81,0%)	239,99 (86,9%)	489,47 (83,8%)
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas	33,00	-	33,00	31,45 (95,3%)	-	31,45 (95,3%)
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	4,30	-	4,30	3,93 (91,4%)	-	3,93 (91,4%)
JUMLAH	533,23	522,32	1.055,55	448,83 (84,2%)	451,12 (86,4%)	899,95 (85,3%)

Sumber: Laporan Pemantauan Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2014

Selanjutnya, berikut ini penjelasan anggaran dan capaian tahun 2014 di masing-masing program adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Pembangunan Nasional

(Rp. Miliar)

PROGRAM	PAGU ANGGARAN			REALISASI ANGGARAN		
	RM	PHLN	TOTAL	RM	PHLN	TOTAL
Perencanaan Pembangunan Nasional	187,96	246,29	434,25	163,98 (87,2%)	211,07 (85,7%)	375,04 (86,4)

Anggaran Program Perencanaan Pembangunan Nasional dialokasikan untuk melaksanakan tugas utama antara lain untuk kegiatan:

- a) Penyusunan rencana pembangunan nasional dan pendanaan/penganggarannya, baik antarwaktu, sektor, wilayah maupun antartingkat/fungsi pemerintahan.
- b) Koordinasi perencanaan, antara lain: koordinasi pemantauan pelaksanaan RAD percepatan pencapaian MDG, pemantauan dan evaluasi pencapaian RAN/D Pangan dan Gizi 2011-2015, persiapan hibah *Millennium Challenge Corporation for Indonesia* (MCC for Indonesia-USA) serta penyusunan dan pelaksanaan MP3KI.
- c) Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, antara lain: evaluasi 3 (tiga) tahun pelaksanaan RPJMN 2010-2014, evaluasi akhir tahun RKP 2012, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PerPres 55/2012 tentang Stranas PPK Jangka

Panjang 2010-2025 dan Jangka Menengah 2010-2014.

- d) Penyusunan Kajian Kebijakan di bidang perencanaan (fungsi *Think-Tank*) antara lain: melakukan kajian untuk perumusan perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek dengan melibatkan *stakeholder* (dunia usaha, asosiasi profesi, asosiasi usaha, dan perguruan tinggi).

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan tersebut di atas sesuai dengan pencapaian target indikator kinerja utama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis tahun 2014.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

(Rp. Miliar)

PROGRAM	PAGU ANGGARAN			REALISASI ANGGARAN		
	RM	PHLN	TOTAL	RM	PHLN	TOTAL
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	307,98	276,02	584,00	249,47 (81,0%)	239,99 (86,9%)	489,47 (83,8%)

Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan tugas utama antara lain untuk kegiatan:

- Peningkatan kapasitas instansi/unit perencanaan di pusat dan di daerah.
- Penyempurnaan tata kelola dan manajemen internal antara lain: pemantapan Reformasi Birokrasi, mempertahankan pencapaian opini laporan keuangan (WTP), serta penataan manajemen asset Kementerian PPN/Bappenas.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan daerah.
- Peningkatan kualitas kehumasan, serta sistem data dan informasi perencanaan pembangunan.

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan tersebut di atas sesuai dengan pencapaian target indikator kinerja utama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis tahun 2014.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas

(Rp. Miliar)

PROGRAM	PAGU ANGGARAN			REALISASI ANGGARAN		
	RM	PHLN	TOTAL	RM	PHLN	TOTAL
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas	33,00	-	33,00	31,45 (95,3%)	-	31,45 (95,3%)

Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan tugas utama antara lain untuk kegiatan:

- a) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan kantor.
- b) Peningkatan fasilitas pelayanan umum dan operasional.
- c) Peningkatan kualitas penunjang pelayanan umum dan operasional.

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan tersebut di atas sesuai dengan pencapaian target indikator kinerja utama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis tahun 2014.

4. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Bappenas

(Rp. Miliar)

PROGRAM	PAGU ANGGARAN			REALISASI ANGGARAN		
	RM	PHLN	TOTAL	RM	PHLN	TOTAL
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	4,30	-	4,30	3,93 (91,4%)	-	3,93 (91,4%)

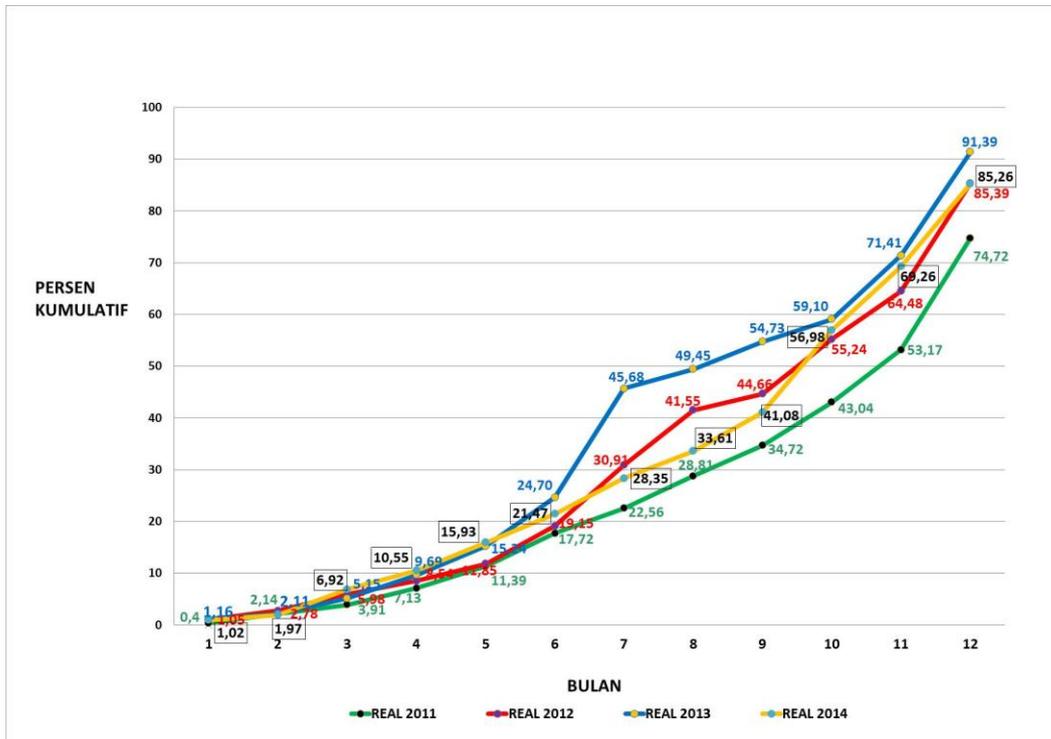
Anggaran Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan tugas utama antara lain untuk kegiatan:

- a) Optimalisasi Peran Konsultasi Internal Auditor.
- b) Koordinasi Strategis Rencana Aksi Mempertahankan Opini Laporan Keuangan.
- c) Koordinasi Strategis Rencana Aksi Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- d) Penyusunan Kebijakan *Whistle Blowing System* (WBS).
- e) Rencana Aksi Peningkatan Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- f) Pengawasan Anggaran dan Kinerja Program/Kegiatan.

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan tersebut di atas sesuai dengan pencapaian target indikator kinerja utama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis tahun 2014.

Berikut ini adalah grafik perbandingan kinerja penyerapan anggaran tahun 2011-2014, seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar 9
Grafik Kinerja Penyerapan Anggaran
Tahun 2011, 2012, 2013, Dan 2014



Kementerian PPN/Bappenas juga masih perlu melakukan peningkatan pengelolaan hibah terutama hibah langsung berupa uang sehingga pencatatan dalam DIPA dapat diselesaikan pada tahun berjalan. Di samping itu masih perlu ditingkatkan koordinasi yang lebih intensif di setiap pengelola kegiatan dan anggaran agar akurasi penyusunan laporan keuangan tetap terjaga.

C. BEBERAPA PENGHARGAAN YANG DITERIMA OLEH KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Kementerian PPN/Bappenas dari tahun ke tahun terus berupaya melakukan penyempurnaan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja yang berkualitas. Beberapa penghargaan yang telah diterima oleh Kementerian PPN/Bappenas setiap tahunnya dapat mendorong peningkatan kinerja dan terciptanya lingkungan kerja yang baik, seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar 10
Penghargaan yang diterima oleh Kementerian PPN/Bappenas



BAB IV

PENUTUP

Sebagaimana tujuan dan sasaran tahun 2014 yang ditetapkan dalam Renstra 2010-2014, Kementerian PPN/Bappenas telah menghasilkan Rancangan Dokumen RT-RPJMN 2015-2019 dan RKP 2015 yang berkualitas. Selain itu, juga telah menyelesaikan berbagai penugasan lainnya, baik yang diberikan Pemerintah/Presiden dalam rangka peningkatan koordinasi dan kerjasama pembangunan melalui suatu rencana aksi nasional maupun kerjasama pembangunan internasional. Sedangkan dalam kaitan peningkatan kapasitas kelembagaan, telah dicapai hasil yang memuaskan dalam bidang pengelolaan keuangan, pengembangan kapasitas kelembagaan dari aspek organisasi, manajemen SDM dan tatalaksana, penguatan akuntabilitas kinerja, pengawasan serta pelayanan, baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mendukung tujuan reformasi birokrasi nasional.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2014 dan tahun-tahun sebelumnya selama periode Renstra 2010-2014, secara umum Kementerian PPN/Bappenas telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi misi dan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja. Trend hasil kinerja menunjukkan peningkatan kualitas hasil dengan pencapaian yang terus meningkat sampai dengan tahun terakhir Renstra 2010-2014.

Atas tercapainya hasil kinerja tahun 2014, pencapaian kinerja untuk tahun-tahun mendatang harus terus ditingkatkan untuk menunjukkan sebagai lembaga perencana yang sangat strategis. Beberapa upaya untuk mendorong optimalisasi peningkatan kinerja secara terus menerus adalah sebagai berikut: 1) meningkatkan peran dalam mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan termasuk penentuan sasaran atau target yang lebih realistis; 2) terus melakukan peningkatan kompetensi SDM agar dapat cepat tanggap dalam memprediksi atau mendeteksi dini (*early warning system*) terhadap perubahan lingkungan strategis nasional maupun internasional; 3) melakukan perbaikan dan pengembangan kapasitas kelembagaan dalam mendukung Reformasi Birokrasi; dan 4) melakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja secara berkala dan berjenjang terhadap unit kerja eselon II, unit kerja eselon I, sampai tingkat lembaga yang didukung oleh aplikasi *e-performance*.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
PERNYATAAN REVIU LAPORAN KINERJA 2014
OLEH INSPEKTUR UTAMA



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2, JAKARTA 10310
TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374
www.bappenas.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
TAHUN ANGGARAN 2014**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Tahun Anggaran 2014 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 25 Februari 2015

Inspektur Utama

Ir. Slamet Soedarsono, MPP, QIA, CRMP

NIP. 19620707 198811 1 001